

LAPORAN LAPANGAN

Gampong Persiapan Ketibung Musara: Menata Lembaran Baru Penuh Tantangan

Alma Arief

Syaikhu Usman



Kegiatan ini didukung oleh OXFAM GB-Indonesia Office

LAPORAN LAPANGAN

**Gampong Persiapan Ketibung Musara:
Menata Lembaran Baru Penuh Tantangan**

**Lembaga Penelitian SMERU
OXFAM GB-Indonesia Office
Jakarta
Februari 2010**

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan Lembaga Penelitian SMERU.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan kelompok diskusi terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat sur-el smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Arief, Alma

Gampong Persiapan Ketibung Musara: Menata Lembaran Baru Penuh Tantangan / Alma Arief dan Syaikhu Usman. -- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2010.

vii, 38 p. ; 29 cm. -- (Laporan Lapangan SMERU, Februari 2010)

ISBN 978-979-3872-69-8

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Profil desa | I. Usman, Syaikhu |
| 2. Nanggroe Aceh Darussalam | II. SMERU |

TIM PENELITI

SMERU:

Alma Arief
Syaikhu Usman

Tim AKP Kabupaten Aceh Timur:

Sukirman
Darmawan M. Ali
Siti Zuarida
Helmi Munir
Rosmaladewi

EDITOR

Budhi Adrianto
Justin Sodo
Liza Hadiz

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bukhari Muslim MH, *Keuchik* Gampong Persiapan Ketibung Musara dan para kepala dusun, serta keluarga Bapak Rancak yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Laporan ini dapat ditulis berkat kesediaan para tokoh dan warga masyarakat Gampong Persiapan Ketibung Musara untuk memberikan informasi secara terbuka dan apa adanya. Untuk semua itu, kami sampaikan terima kasih.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada OXFAM GB-Indonesia Office yang telah mendukung seluruh kegiatan penelitian ini.

ABSTRAK

Gampong Persiapan Ketibung Musara: Menata Lembaran Baru Penuh Tantangan

Alma Arief dan Syaikhu Usman

Tulisan ini memaparkan kondisi kesejahteraan masyarakat Gampong (Persiapan) Ketibung Musara di Aceh Timur. Pengumpulan informasi dan analisis dilakukan bersama masyarakat, terutama kelompok miskin. Masyarakat Ketibung Musara menilai bahwa kondisi kesejahteraan mereka 2–3 tahun terakhir ini mulai membaik setelah kembali dari mengungsi akibat konflik. Namun, masih banyak persoalan yang menghambat penghidupan mereka, antara lain, tidak adanya modal untuk mengelola lahan terlantar yang luas, ancaman hama binatang, terbatasnya sarana transportasi, tidak adanya sarana MCK, putus sekolah (akibat mengungsi), kurangnya perhatian pemerintah pada kegiatan penyuluhan dan program pembangunan, serta banyaknya pengangguran.

Sumber penghidupan utama masyarakat Gampong adalah berladang dan berkebun secara tradisional. Luas *gampong* yang 150 km² belum mampu sepenuhnya dimanfaatkan untuk menopang penghidupan mereka. Sekitar 120 km² di antaranya mereka usulkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi lokasi program revitalisasi perkebunan.

Berkaitan dengan hal di atas, mereka membutuhkan bantuan dari luar berupa bibit unggul, sarana dan peralatan pertanian lainnya; penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan bertani; penanggulangan hama; dan pembentukan koperasi atau lembaga keuangan. Mereka juga mengharapkan adanya perusahaan swasta yang mau menyediakan transportasi umum reguler, masuknya pedagang pengumpul hasil pertanian, adanya lembaga simpan-pinjam, dan dukungan untuk membangun sarana air bersih. Untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kaum muda, mereka mengharapkan adanya program belajar paket A, B, dan C, serta peningkatan sarana dan tenaga kependidikan.

Kata kunci: Ketibung Musara, Aceh Timur, kesejahteraan, analisis kemiskinan partisipatoris.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
RANGKUMAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Sebab-Akibat Kemiskinan	2
II. GAMBARAN UMUM GAMPONG KETIBUNG MUSARA	5
III. DINAMIKA PENGHIDUPAN MASYARAKAT	9
3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia	9
3.2 Kondisi Sumber Daya Alam	11
3.3 Kondisi Infrastruktur	13
3.4 Kondisi Ekonomi dan Keuangan	15
3.5 Kondisi Modal Sosial	17
IV. KERENTANAN DAN MEKANISME BERTAHAN	19
4.1 Peristiwa yang Mengguncang	19
4.2 Peristiwa Musiman	20
4.3 Peristiwa yang Bersifat Kecenderungan	22
V. PERAN LEMBAGA DAN KELEMBAGAAN GAMPONG	25
5.1 Lembaga Pemerintahan <i>Gampong</i>	25
5.2 Peran Lembaga Adat	27
5.3 Peran Lembaga Sosial dan Keagamaan	27
VI. PRIORITAS DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	29
6.1 Prioritas Masalah	29
6.2 Alternatif Pemecahan Masalah	29
VII. CATATAN PENUTUP	33
DAFTAR ACUAN	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penyebab Utama Kemiskinan menurut Kelompok FGD	2
Tabel 2.	Akibat Kemiskinan menurut Kelompok FGD	3
Tabel 3.	Proporsi Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan, 2008	7
Tabel 4.	Tingkat Kesejahteraan Penduduk dan Ciri-cirinya, 2008	8
Tabel 5.	Komposisi Penduduk Gampong (Persiapan) Ketibung Musara	10
Tabel 6.	Peruntukan Lahan di Gampong Ketibung Musara	13
Tabel 7.	Jenis Pekerjaan <i>Ongkosan</i> dan Sistem Pengupahannya	15
Tabel 8.	Pendapatan dan Kontribusi Anggota Keluarga	16
Tabel 9.	Kecenderungan Perubahan di Gampong Ketibung Musara 10 Tahun Terakhir	22
Tabel 10.	Pokok dan Alternatif Pemecahan Masalah menurut Kelompok Bapak	30
Tabel 11.	Pokok dan Alternatif Pemecahan Masalah menurut Kelompok Ibu	31
Tabel 12.	Pokok dan Alternatif Pemecahan Masalah Menurut Kelompok Remaja	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Lokasi Gampong Ketibung Musara, Kabupaten Aceh Timur	5
Gambar 2.	Peta sosial Gampong Ketibung Musara	6
Gambar 3.	Perkebunan rakyat: coklat dan pinang	7
Gambar 4.	Pentagonal aset masyarakat Ketibung Musara	9
Gambar 5.	Ikan <i>Labedu</i> sumber gizi dan penghasilan	12
Gambar 6.	Rumah yang tergolong baik (kiri) dan yang ditinggal mengungsi (kanan)	14
Gambar 7.	Truk pengangkut kayu gelondongan	23
Gambar 8.	Struktur organisasi pemerintahan Gampong Ketibung Musara	25

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AKP	analisis kemiskinan partisipatoris
askeskin	asuransi kesehatan untuk penduduk miskin
BAB	buang air besar
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM	bahan bakar minyak
BLK	Balai Latihan Kerja
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
BRR	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
FGD	<i>focus group discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
kaur	kepala urusan
KK	kepala keluarga
LKMD	lembaga ketahanan masyarakat desa
LSM	lembaga swadaya masyarakat
MCK	mandi, cuci, kakus
musrenbang	musyawarah perencanaan pembangunan
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
pemda	pemerintah daerah
perda	peraturan daerah
PLTS	pembangkit listrik tenaga surya
PNPM	program nasional pemberdayaan masyarakat
PPL	penyuluh pertanian lapangan
puskesmas	pusat kesehatan masyarakat
pustu	puskesmas pembantu
raskin	beras untuk penduduk miskin
RBT	rakyat banting tulang (usaha transportasi ojek-sepeda motor)
SD	sekolah dasar
SDA	sumber daya alam
SDM	sumber daya manusia
SMA	sekolah menengah atas
SMP	sekolah menengah pertama
TKW	tenaga kerja wanita
TNI/POLRI	Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia
WWF	World Wildlife Fund

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Hingga akhir 2007 Desa Ketibung Musara masih merupakan bagian Gampong Bunin (desa induk). Jarak Dusun Ketibung dengan pusat desa induk sejauh 20 km. Hal ini menjadi penyebab dusun ini kurang mendapat perhatian. Pada 2007, calon kepala desa dari dusun Ketibung ditolak penduduk dusun induk untuk ikut bertarung dalam pemilihan. Berdasarkan kedua hal tersebut, pada Februari 2007 penduduk Ketibung mengajukan pemisahan diri dan sekarang berstatus sebagai desa persiapan.

Pada 2000 ketika konflik antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan TNI/POLRI (Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia) makin memanas, semua penduduk mengungsi dan sampai saat ini masih banyak yang belum kembali. Akibatnya, tingkat ekonomi dan pendidikan warga tertinggal. Namun, penduduk menilai sejak kembali dari mengungsi kondisi kesejahteraan mereka makin membaik. Meskipun begitu, mereka menyadari masih banyak persoalan yang menghambat penghidupan mereka. Beberapa permasalahan mendasar, antara lain, adalah luasnya lahan yang terlantar, tidak ada modal untuk mengelolanya, ancaman hama binatang, terbatasnya sarana transportasi, tidak ada sarana MCK (mandi, cuci, kakus), banyak anak putus sekolah (akibat mengungsi), kurangnya perhatian pemerintah pada kegiatan penyuluhan dan program pembangunan, serta pengangguran akibat lapangan kerja yang terbatas.

Lokasi Gampong Ketibung Musara tergolong strategis, berada di pinggir jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Luwes. Di kiri dan kanan jalan terdapat permukiman penduduk yang terbagi dalam tiga dusun, yaitu Jamur Batang, Karang Indah, dan Ketibung. Ketiga dusun ini dihuni 123 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 581 jiwa (312 laki-laki dan 269 perempuan).ⁱ Penduduk Ketibung Musara tergolong homogen. Semua penduduknya beragama Islam dan mayoritas (80%) bersuku Gayo, sisanya adalah pendatang yang terdiri dari suku Aceh (8%), Jawa (5%), dan lainnya (7%). Hampir semua penduduk bermatapencaharian sebagai petani (Elite Desa,ⁱⁱ Gampong Ketibung Musara, NAD,ⁱⁱⁱ 28 Juli 2008). Dengan menggunakan ukuran kesejahteraan lokal, penduduk menggolongkan dirinya ke dalam golongan *miskin* (83%), *sederbana* (15%), dan *kaya* (2%).^{iv}

Sumber daya alam di daerah yang luasnya 150 km² ini cukup beragam, antara lain, lahan pertanian, hutan dengan berbagai hasil dan keragaman flora/faunanya, bahan galian tambang, serta sungai dan air terjun. Namun, belum semua sumber tersebut didayagunakan karena keterbatasan modal dan penguasaan teknologi. Penduduk menggantungkan pencahariannya pada kegiatan perkebunan (cokelat, kelapa sawit, pinang, karet), pertanian lahan kering (padi ladang), mengambil hasil hutan (damar, rotan, gambir, madu), dan menangkap ikan di sungai. Selain itu, sebagai pekerjaan tambahan mereka menanam sayur, memelihara ternak (ayam, bebek, kambing, kerbau), menganyam tikar, dan menjadi buruh serabutan.

ⁱMenurut data kecamatan, penduduk *gampong* ini berjumlah 1504 jiwa (304 KK) yang terdiri dari 753 laki-laki dan 751 perempuan (Pemerintah Kecamatan Serbajadi, 2007).

ⁱⁱElite desa tersebut terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, seorang pemuka adat, dan seorang pemuka agama.

ⁱⁱⁱNanggroe Aceh Darussalam.

^{iv}Pada 2003, semua penduduk tergolong miskin karena konflik melumpuhkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat (FGD Klasifikasi Kesejahteraan, Kelompok Gabungan, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008).

Hingga sekarang perkebunan yang sesungguhnya menjadi andalan penghidupan penduduk desa belum sepenuhnya menghasilkan. Lahan yang terlantar akibat ditinggal mengungsi pada saat konflik telah berubah menjadi semak belukar dan menjadi habitat berbagai jenis binatang (babi, monyet, rusa, gajah). Usaha mengelola perkebunan dan ladang sering diganggu oleh hama binatang tersebut. Paling tidak tiga kali dalam setahun, rombongan gajah melewati perkebunan di desa ini dan merusak pucuk pohon sawit atau merobohkan pohon pinang.

Akibat mengungsi, banyak remaja mengalami putus sekolah dan saat ini mereka sudah terlalu tua untuk kembali ke sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP). SMP terdekat berada di Gampong Peunaron yang jauhnya lebih kurang 10 km. Keluarga miskin umumnya tidak mampu melanjutkan pendidikan ke SMP karena terbatasnya sarana transportasi. Sarana kesehatan juga kurang memadai, tidak ada puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), pustu (puskesmas pembantu), atau pun polindes (pondok bersalin desa). Penduduk umumnya hanya berobat pada dukun. Sementara itu, wabah diare menjadi ancaman di musim kemarau. Hal ini terutama akibat dari tidak tersedianya jamban. Masyarakat terbiasa membuang air besar di kebun atau di sungai. Sungai tersebut juga menjadi tempat mandi, cuci, dan sumber air minum.

Dalam kehidupan sehari-hari warga desa menghormati tokoh adat dan perangkat desa dan mereka menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Di desa ini ada beberapa kelompok sosial/keagamaan, antara lain, kelompok wirid Yasin, kesenian (*didong, saman, bines*), tahlilan, arisan, dan gotong-royong. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan media tempat masyarakat bersosialisasi sehingga kohesivitas sosial dapat terpelihara. Keharmonisan hubungan sosial dan gotong-royong juga makin meningkat setelah pemekaran desa. Contohnya, penduduk mampu membangun sebuah masjid sederhana secara swadaya.

Sejak 2006 Gampong Ketibung Musara mendapat bantuan pemerintah berupa bangunan sekolah dasar yang dikelola swasta yang terdiri dari tiga lokal. Di sekitar lokasi tersebut akan dibangun juga kantor pemerintahan *gampong*. Program lain yang telah diterima masyarakat, di antaranya, adalah bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk 45 rumah, bantuan langsung tunai (BLT), beras untuk penduduk miskin (*raskin*), asuransi kesehatan untuk penduduk miskin (*askeskin*), dan perbaikan jalan. Masyarakat menilai PLTS, *raskin*, BLT, dan perbaikan jalan sangat bermanfaat, sementara *askeskin* kurang bermanfaat karena jauhnya lokasi dan kurang baiknya pelayanan puskesmas (FGD^v Evaluasi Program Bantuan, Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008).

Upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah diusulkan pemerintah *gampong* ke Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah agar desa ini menjadi lokasi Program Revitalisasi Perkebunan. Program ini dipilih sebagai alternatif utama penanggulangan kemiskinan sebab di sini terdapat lahan yang belum dimanfaatkan seluas lebih dari 12.000 ha. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan *gampong* ini, masyarakat membutuhkan bantuan dari luar berupa bibit unggul dan sarana serta peralatan pertanian lainnya, penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan bertani, penanggulangan hama, dan pembentukan koperasi atau lembaga keuangan. Mereka juga mengharapkan adanya perusahaan swasta yang mau menyediakan transportasi umum yang reguler, masuknya pedagang pengumpul hasil pertanian, adanya lembaga simpan-pinjam, dan dukungan untuk membangun sarana air bersih. Untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kaum muda, mereka mengharapkan adanya program belajar paket A, B, dan C, dan peningkatan sarana dan tenaga pendidikan di Gampong Ketibung Musara.

^v*focus group discussion* (diskusi kelompok terfokus)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketibung Musara adalah sebuah *gampong* yang saat ini sedang dalam persiapan menjadi *gampong* definitif, melepaskan diri dari induknya, Gampong Bunin. Gampong persiapan ini terdiri dari tiga dusun, yaitu Jamur Batang, Karang Indah, dan Ketibung. Luas Gampong Bunin 215 Km², sangat luas untuk ukuran sebuah *gampong*. Dengan luas tersebut dan relatif masih belum berkembangnya sarana perhubungan termasuk transportasi dan komunikasi, membuat mobilitas penduduk dan hubungan timbal-balik antardusun dan/atau dengan pusat administrasi *gampong* terhambat. Jarak Gampong Bunin dengan Gampong Persiapan Ketibung Musara yang sejauh 20 km menyebabkan tidak efektifnya pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah *gampong* selama ini (Pemerintah Kecamatan Serbajadi, 2007). Hal inilah yang menjadi alasan utama untuk masyarakat tiga dusun tersebut memisahkan diri dari Gampong Bunin.

Pada sisi lain, penggabungan ketiga dusun sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah *gampong*, yaitu jumlah penduduk yang mencapai 1.504 jiwa dengan 304 KK (Pemerintah Kecamatan Serbajadi, 2007), sementara luas wilayah gabungan ketiga dusun tersebut mencapai 150 Km². Namun, akibat eskalasi konflik, maka pada awal 2000, dapat dikatakan semua penduduk meninggalkan *gampong* dan sampai saat ini masih banyak yang belum kembali. Pada awal 2007, menurut catatan perangkat *gampong*, penduduk Ketibung Musara yang kembali dari pengungsian sebanyak 123 KK dengan jumlah 581 jiwa (312 laki-laki dan 123 perempuan). Meskipun begitu, jumlah penduduk yang ada sekarang pun memenuhi syarat untuk bergabung dan membentuk sebuah *gampong* yang berdiri sendiri.

Proses pengembangan menjadi sebuah *gampong* mempunyai latar belakang yang cukup unik. Bukan hanya persyaratan administratif yang melatarbelakangi pembentukannya seperti telah diuraikan di atas, tetapi juga dinamika sosial dan politik di tingkat *gampong*. Satu hal yang tidak dijelaskan dalam proposal pembentukan Gampong Ketibung Musara adalah adanya diskriminasi politik terhadap penduduk ketiga dusun tersebut. Menurut penjelasan beberapa tokoh masyarakat, pada saat akan dilaksanakan pemilihan Kepala Gampong Bunin pada 2007, penduduk Dusun Ketibung tidak diperbolehkan mencalonkan diri untuk ikut bertarung menjadi kepala *gampong* dengan alasan lokasinya terlalu jauh dari Ibu Kota Gampong Bunin. Bahkan, pihak pemerintah *gampong* induk memberikan alternatif bagi ketiga dusun untuk membentuk sebuah *gampong* tersendiri yang terpisah dari Gampong Bunin. Pemikiran alternatif ini mendorong masyarakat untuk membentuk *gampong* baru yang merupakan gabungan dari tiga dusun tersebut. Harapan di balik pembentukan *gampong* baru itu tertuang dalam proposal pembentukan Gampong Persiapan Ketibung Musara seperti berikut ini.

Dengan terbentuknya *gampong* persiapan Ketibung Musara hasil pemekaran Gampong Bunin (*gampong* induk) ... pelayanan masyarakat di segala bidang, yakni pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan akan menjadi lebih baik, efisien dan efektif sesuai tuntutan masyarakat. (Pemerintah Kecamatan Serbajadi, 2007)

Kini ketiga dusun tersebut tinggal menunggu pengesahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk resmi menjadi sebuah *gampong* definitif. Pusat Pemerintahan Gampong Ketibung Musara rencananya akan ditempatkan di Dusun Karang Indah (penduduk juga menyebutnya Dusun Karang Kuda) yang letaknya berada di antara Dusun Ketibung dan Dusun Jamur Batang.

1.2 Sebab-Akibat Kemiskinan

Sebagian besar (83%) penduduk Ketibung Musara dikategorikan miskin, bahkan yang oleh masyarakat setempat dikelompokkan sebagai sederhana (lapisan menengah), kondisinya tidak terlalu berbeda dengan mereka yang berkategori miskin (FGD Klasifikasi Kesejahteraan, Kelompok Gabungan, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008). Sekarang mereka tengah bekerja keras memulihkan sendi-sendi kehidupan yang luluh-lantak akibat konflik antara GAM dan TNI/POLRI. Meskipun begitu, penduduk menilai selama kurun 2–3 tahun terakhir ini mereka merasakan kehidupan yang makin membaik.

Akan tetapi, mereka menyadari bahwa realitas persoalan yang mereka hadapi masih banyak dan berat. Selama mengungsi akibat konflik, lahan yang menjadi sandaran kehidupan mereka terlantar dan berubah menjadi semak belukar. Meskipun begitu, Tabel 1 tentang penyebab utama kemiskinan memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi menyebut konflik sebagai persoalan mereka. Agaknya, konflik sudah ingin mereka lupakan. Persoalan yang mereka ungkapkan adalah hal-hal praktis dan nyata, langsung atau tidak langsung yang sehari-hari mereka hadapi sebagai penyebab atas kesulitan atau kemiskinan hidup mereka.

Tabel 1. Penyebab Utama Kemiskinan menurut Kelompok FGD

Kelompok FGD	Sebab Kemiskinan
1. Kelompok ibu	1. Kurangnya sarana transportasi 2. Tidak punya modal usaha 3. Tidak ada fasilitas MCK
2. Kelompok bapak	1. Lahan terlantar 2. Tidak ada modal 3. Pertanian/perkebunan gagal
3. Kelompok remaja	1. Putus sekolah 2. Kurangnya perhatian pemerintah 3. Pengangguran karena tidak ada modal

Sumber: FGD Sebab-Akibat Kemiskinan, Kelompok Ibu, Kelompok Bapak, dan Kelompok Remaja, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008.

Dari tiga prioritas masalah yang dikemukakan masing-masing kelompok, ternyata ada satu masalah yang menjadi isu bersama, yaitu ketiadaan modal usaha. Isu bersama ini mempunyai keterkaitan dengan latar belakang mereka yang menggantungkan hidup dari usaha perkebunan. Secara umum pengelolaan perkebunan memerlukan modal yang jauh lebih besar yang karenanya sulit bagi mereka, terutama kelompok miskin, untuk memperolehnya dibanding dengan, misalnya, usaha pertanian tanaman pangan. Dari penggabungan masalah utama kemiskinan yang dimajukan setiap kelompok (lihat Tabel 1), di luar “tidak punya modal” terdapat enam persoalan sebagai penyebab utama kemiskinan, yaitu kurangnya sarana transportasi (kelompok ibu), luasnya lahan terlantar (kelompok bapak), tidak tersedia fasilitas MCK (kelompok ibu), putus sekolah (kelompok remaja), pertanian/perkebunan gagal (kelompok bapak), dan kurangnya perhatian pemerintah (kelompok remaja).

Berdasarkan pengamatan terhadap “kelompok mana menyatakan apa?” terlihat bahwa setiap kelompok cenderung menyampaikan persoalan yang sangat terkait dengan hal-hal yang sehari-hari mereka alami atau pikirkan. Ibu-ibu yang mengalami betapa lelahnya berjalan kaki berkilo meter untuk pulang-balik ke pasar mengemukakan penyebab kemiskinan adalah “kurangnya transportasi”. Remaja yang kurang nyaman dengan kenyataan rendahnya pendidikan mereka

mengungkapkan “putus sekolah” sebagai penyebab kemiskinan. Masih berkaitan dengan pendidikan masyarakat, remaja melihat kurangnya perhatian pemerintah kepada mereka dengan indikasi tidak adanya kunjungan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan penyuluh kesehatan/keluarga berencana (KB). Bapak-bapak yang merasa paling bertanggung jawab dalam menghidupi keluarganya memunculkan persoalan kemiskinan terkait dengan “usaha pertanian gagal” dan bersamaan dengan itu bapak-bapak melihat “lahan terlantar” sebagai sumber kesejahteraan di masa depan.

Kemiskinan dan akibat yang ditimbulkannya dapat dikatakan merupakan benang kusut yang susah dicari ujung pangkalnya. Menurut peserta FGD Sebab-Akibat Kemiskinan, termasuk kelompok bapak, ibu, dan remaja (lelaki dan perempuan), kemiskinan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah sosial dan ekonomi (Tabel 2).

Tabel 2. Akibat Kemiskinan menurut Kelompok FGD

Kelompok Ibu	Kelompok Bapak	Kelompok Remaja
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah rusak/tak terawat ▪ Tak mampu menyekolahkan anak ▪ Tidak mampu berobat ▪ Tidak punya MCK (WC terbang) ▪ Lahan terlantar ▪ Tidak bisa makan 3x sehari ▪ Mau belanja tidak ada uang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak bisa menyekolahkan anak ▪ Putus sekolah ▪ Tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ▪ Terjadi perceraian ▪ Tidak bisa membangun rumah ▪ Tidak bisa berobat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Putus sekolah ▪ Lingkungan tidak bersih ▪ Kesehatan rendah ▪ Kurang gizi ▪ Pengangguran ▪ Menjadi TKW ▪ Mencari kerja ke luar <i>gampong</i> ▪ Stres ▪ Mengemis

Sumber: FGD Sebab-Akibat Kemiskinan, Kelompok Ibu, Kelompok Bapak, dan Kelompok Remaja, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008.

Masalah kesehatan fisik dan lingkungan, pendidikan anak, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi perhatian bersama oleh semua kelompok. Penyebab kemiskinan dapat sekaligus menjadi akibat kemiskinan, sebagaimana yang terkandung dalam ungkapan “lingkaran setan kemiskinan”. Hanya kelompok bapak yang tidak memunculkan penyebab juga sebagai akibat kemiskinan, sementara pada kelompok ibu menempatkan “tidak punya MCK”, baik sebagai penyebab maupun akibat kemiskinan, pada kelompok pemuda bahkan menyebut “putus sekolah” dan “pengangguran” sebagai penyebab dan akibat kemiskinan.

Dalam diskusi sebab-akibat kemiskinan ini, hanya kelompok remaja yang mengemukakan akibat kemiskinan yang sekaligus dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan, yaitu “menjadi tenaga kerja wanita (TKW—istilah ini untuk perempuan yang bekerja di luar negeri)” dan “mencari kerja ke luar *gampong*”. Ungkapan para remaja tersebut agaknya disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka melihat penghidupan di *gampong* sulit berkembang. Persoalannya, kalau remaja yang rata-rata berpendidikan rendah saja melihat perbaikan penghidupan mereka ada di luar *gampong*, apalagi bagi mereka yang berpendidikan menengah. Kecenderungan seperti ini, pada gilirannya, akan menghambat masa depan pembangunan *gampong*.

1.3 Struktur dan Isi Laporan

Laporan ini disusun dalam tujuh bab. Bab I merupakan penjelasan pendahuluan yang menyajikan latar belakang Gampong Ketibung Musara di Kabupaten Aceh Timur sebagai sebuah desa yang tergolong tertinggal yang memperjuangkan diri menjadi *gampong* definitif. Bab II secara ringkas menggambarkan kondisi umum *gampong*, terutama menyangkut lokasi,

topografi, kondisi lingkungan, dan populasinya. Bab III menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan penduduk dengan menggunakan pendekatan pentagonal aset. Bab IV membahas beberapa kejadian penting dan besar yang menguncang kehidupan penduduk, baik yang terjadinya tiba-tiba maupun musiman dan cara mereka mengatasinya. Bab V menguraikan peran lembaga dan kelembagaan di *gampong* yang mulai mengembangkan dan menampilkan keberadaannya setelah berstatus sebagai “*gampong* persiapan”. Bab VI berisi berbagai pemikiran penduduk tentang jalan keluar dari kemiskinan yang mungkin dilakukan. Bab VII berisi kesimpulan dan beberapa pemikiran untuk mengatasi persoalan utama yang dihadapi masyarakat Ketibung Musara.

II. GAMBARAN UMUM GAMPONG KETIBUNG MUSARA

Apabila Gampong Ketibung Musara resmi menjadi sebuah *gampong* definitif berarti secara administratif *gampong* ini akan menjadi unit pemerintahan paling bawah yang berlokasi di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong Ketibung Musara secara tipologi merupakan permukiman yang penduduknya hidup dari usaha perkebunan. Secara geografis, *gampong* ini masih terisolasi dari daerah lain di Kabupaten Aceh Timur. Meskipun berlokasi di tepi jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Luwes, transportasi untuk mengakses daerah lain masih tergolong sulit. Memang, *gampong* ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor) maupun kendaraan roda empat. Namun, belum tersedia pelayanan kendaraan umum secara reguler, walaupun ada kendaraan umum tarifnya tergolong mahal, terutama bagi masyarakat miskin. Pada musim panas, kondisi jalan bisa dilalui semua jenis kendaraan dengan mudah, sementara pada musim hujan dengan intensitas tinggi, biasanya jalan ini akan tergenang banjir sehingga sulit dilalui kendaraan.



Gambar 1. Lokasi Gampong Ketibung Musara, Kabupaten Aceh Timur

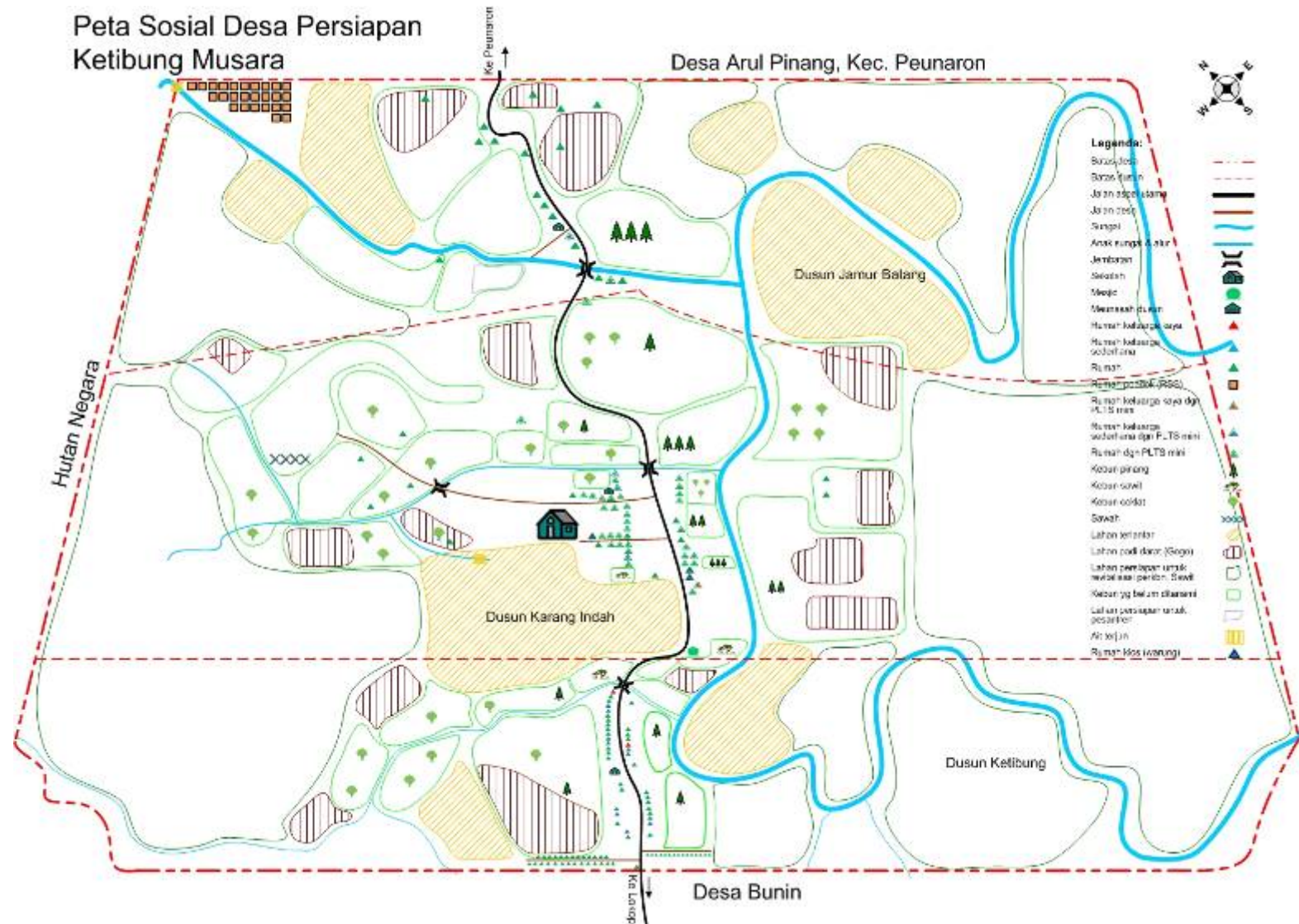
Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Aceh Timur dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Aceh Timur (2007).

kebun coklat, tumbuh di lereng perbukitan yang tidak terlalu terjal. Di beberapa tempat, hutan dengan jenis tanaman heterogen tumbuh di perbukitan dengan elevasi lebih dari 45 derajat sehingga berfungsi sebagai hutan lindung. Dalam peta (Gambar 2), *gampong* ini berbentuk menyerupai bangun trapesium dengan batas-batas sebagai berikut.

Sebelah Timur	: Gampong Arul Pinang
Sebelah Barat	: Gampong (induk) Bunin
Sebelah Selatan	: Hutan Negara
Sebelah Utara	: Hutan Negara

Jalan tersebut tidak terlalu lebar, cukup untuk berpapasan dua buah mobil. Di kiri-kanan jalan terdapat tiga pusat permukiman penduduk, masing masing di Dusun Jamur Batang, Dusun Karang Indah, dan Dusun Ketibung. Di ketiga dusun tersebut jumlah seluruh rumah 219 buah. Jarak antara Dusun Karang Indah ke Dusun Jamur Batang lebih kurang sama jauhnya dengan jarak antara Dusun Karang Indah ke Dusun Ketibung, yaitu lebih kurang 1,5 Km.

Topografi Gampong Ketibung Musara merupakan kombinasi antara dataran dan perbukitan. Permukiman penduduk berada di dataran, sedangkan sawah/ladang padi darat, hutan, kebun sawit, kebun pinang,



Gambar 2. Peta Sosial Gampong Ketibung Musara

Sumber: FGD Pemetaan Sosial dan Sumber Daya, Kelompok Gabungan, Gampong Ketibung Musara, NAD, 29 Juli 2008.

Dari aspek ekosistem, *gampong* ini merupakan permukiman yang berada di tengah hutan heterogen yang berselang-seling dengan perkebunan dan ladang darat. Hutan heterogen di sekitar *gampong* ini masih lebat dengan berbagai jenis flora dan fauna. Hampir semua jenis tanaman berupa damar, rotan, gambir, mahoni, meranti, kruing, aren, petai, duren, dan sebagainya, tumbuh subur di hutan ini. Tidak hanya di hutan kadangkala masuk juga ke perkebunan penduduk, berbagai jenis fauna, seperti gajah (secara periodik berpindah tempat dan selalu melintasi permukiman penduduk 2–3 bulan sekali), mawas, babi hutan, rusa, beruang, berbagai jenis burung, dan binatang melata. Di pagi hari dan menjelang senja, hutan ini ramai dengan berbagai suara binatang dan juga kicau burung. Selain hutan heterogen yang masih alami, penduduk juga mengelola lahan untuk pertanian dan perkebunan. Pertanian yang dikembangkan penduduk adalah ladang dengan tanaman padi darat (ladang tadah hujan), sedangkan kebun rakyat ditanami berbagai jenis tanaman, seperti cacao, pinang, kelapa sawit, dan buah-buahan.



Gambar 3. Perkebunan rakyat: coklat dan pinang

Hasil perkebunan yang sesungguhnya menjadi andalan utama mata pencaharian penduduk sekarang ini belum sepenuhnya menghasilkan sebab sejak mengungsi (akibat konflik) lahan pertanian mereka tidak terurus dan menjadi habitat berbagai jenis binatang, termasuk gajah. Dengan kondisi seperti itu, saat kembali dari pengungsian pada 2005 dan 2006, mereka harus bekerja keras merintis penghidupan baru dari awal. Sejak saat itu hingga sekarang, untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari, penduduk bekerja sampingan dengan mencari hasil hutan, seperti damar, rotan, gambir, sarang lebah (madu), dan juga binatang-binatang buruan, termasuk rusa, meskipun telah dilarang.

Selain itu, mereka juga bekerja sebagai pencari ikan, utamanya ikan *labedu*, di Sungai Bunin yang juga menjadi sumber air minum dan masak, serta tempat mandi, cuci, dan buang air besar (BAB). Sungai Bunin yang melintasi *gampong* ini menjadi muara dari tiga anak sungainya, yaitu Kuala Pangguh, Ketibung, dan Jamur Batang. Lebar Sungai Bunin lebih kurang 20 m dan aliran airnya tergolong deras. Di musim kemarau kedalaman sungai rata-rata mencapai 1 m, sedangkan bila banjir bisa mencapai 5-10 m.

Tabel 3. Proporsi Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan, 2008

Tahun	Tingkat Kesejahteraan		
	Kaya	Sedang	Miskin
2008	2%	15%	83%
2003	-	-	100%

Sumber: FGD Klasifikasi Kesejahteraan; Kelompok Gabungan, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008.

Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Penduduk dan Ciri-cirinya, 2008

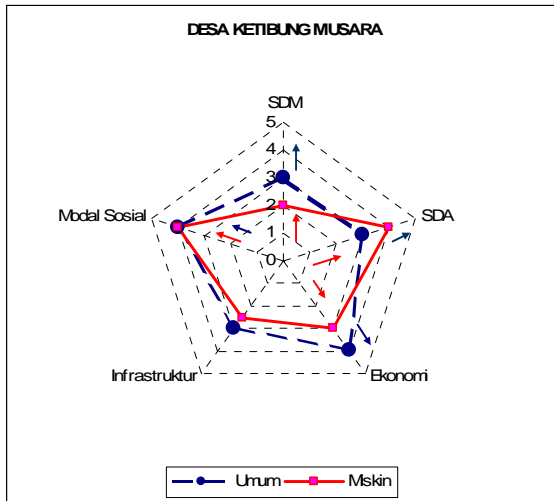
Aspek	Tingkat Kesejahteraan dan Ciri-ciri		
	Kaya	Sederhana	Miskin
Tempat tinggal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah atap seng ▪ Dinding setengah permanen/ papan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah atap seng/rumbia ▪ Dinding terbuat dari papan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah atap daun ▪ Dinding terbuat dari rumbia
Mata pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petani ▪ Pekebun ▪ Dagang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petani sawah/kebun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ongkosan</i> (upahan) ▪ Pencari getah damar, rotan, atau tangkap ikan
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak sekolah sampai SMP-SMA 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak sekolah sampai SMP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak sekolah sampai SD ▪ Tidak sekolah
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berobat ke puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berobat ke dukun kampung/puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berobat ke dukun, karena biaya lebih murah
Pola Makan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makan 3x/hari dengan lauk pauk lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makan 3x/hari, beras IR, sayur, ikan dari usaha sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makan nasi 1x/hari, selebihnya makan ubi/jagung
Kepemilikan barang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Punya ladang kelapa/pisang ± 3 ha ▪ Ladang cokelat ± 30 ha ▪ Ayam 30 ekor ▪ Kambing 10 ekor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Punya kebun cokelat ± 1 ha ▪ Sepeda 1 unit ▪ Bebek 1 ekor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanah ladang ± ½ ha ▪ Tidak punya <i>kereta</i>/sepeda ▪ Punya ayam 2 ekor

Sumber: FGD Klasifikasi Kesejahteraan, Kelompok Gabungan, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008.

Penduduk Gampong Ketibung Musara dapat dikatakan homogen. Ada beberapa indikator yang mendukung tingkat kehomogenan mereka, yaitu dari segi mata pencaharian, suku bangsa, agama, klasifikasi kesejahteraan, dan juga tingkat pendidikan. Hampir semua penduduk bermata pencaharian sebagai petani, khususnya pekebun. Mayoritas (80%) penduduk berasal dari Suku Gayo, sedangkan 20% lainnya adalah pendatang. Para pendatang tersebut berasal dari Suku Aceh (8%), Suku Jawa (5%), dan suku lainnya (7%) (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008). Seluruh penduduk *gampong* ini beragama Islam. Dari segi kemajuan ekonomi, masyarakat Ketibung Musara masih terbelakang. Sebanyak 83% penduduk tergolong miskin (Tabel 3). Hal itu diindikasikan dari asupan makanan (Tabel 4), misalnya, masih banyak penduduk yang hanya makan nasi sekali sehari dan selebihnya makan jagung atau ubi. Warga miskin pada umumnya bekerja serabutan (*ongkosan*). Mayoritas mereka berpendidikan rendah. Sekarang ini tidak ada satu pun penduduk *gampong* ini yang belajar di perguruan tinggi, sementara remaja yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal mencapai 40% (FGD Sebab-Akibat Kemiskinan, Kelompok Remaja, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008).

III. DINAMIKA PENGHIDUPAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dibahas mengenai keadaan aset dan akses penduduk Ketibung Musara terhadap lima aset yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, yaitu: (i) sumber daya manusia (SDM), (ii) sumber daya alam (SDA), (iii) infrastruktur, (iv) ekonomi dan keuangan, dan (v) modal sosial. Kondisi dan akses penduduk terhadap kelima aset tersebut merupakan indikator penting dalam usaha menjelaskan dinamika penghidupan masyarakat di suatu komunitas dengan pendekatan kerangka *pentagonal asset*.



Gambar 4. Pentagonal aset masyarakat Ketibung Musara

Gambar 4 memperlihatkan nilai/skor dari setiap aset dengan kisaran 0–5. Makin baik keadaan aset tertentu dan akses masyarakat terhadapnya, makin tinggi nilai/skor aset tersebut. Sebaliknya, makin terbatas keadaan aset dan akses masyarakat, makin kecil skornya. Garis putus-putus menunjukkan kondisi aset dan akses masyarakat umum terhadap setiap aset, sementara garis penuh menunjukkan hal yang sama, tetapi khusus bagi masyarakat miskin. Tanda panah menunjukkan kecenderungan arah perubahan kondisi aset dan akses penduduk pada 5–10 tahun terakhir. Secara umum terdapat dua titik lemah aset Gampong Ketibung Musara, yaitu pada SDM dan infrastruktur. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sampai sekarang lokasi *gampong* ini masih terisolasi, terutama akibat sarana transportasi yang terbatas dan *gampong* ini masih berstatus sebagai *gampong*

persiapan. Gambar ini juga memperlihatkan skor SDA lebih baik bagi kelompok miskin dibanding kelompok umum. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa 83% penduduk tergolong miskin dan adanya 12.000 ha tanah yang belum digarap dan pada dasarnya setiap penduduk (123 KK), terutama KK miskin, bebas untuk mengelolanya.

3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Struktur penduduk Gampong Ketibung Musara berdasarkan jenis kelamin dan umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif (11–54 tahun) jauh lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk usia nonproduktif (usia di bawah 11 tahun ditambah usia di atas 55 tahun) (lihat Tabel 5). Jumlah penduduk usia nonproduktif sebanyak 691 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia produktif sebesar 813. Hal ini berarti bahwa seorang penduduk usia produktif menanggung beban <1 orang penduduk usia nonproduktif ($691 : 813 = 0,8$).

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan bahwa sebagian besar penduduk Ketibung Musara saat ini belum kembali sejak mereka mengungsi akibat konflik. Data terakhir yang bersumber dari aparat *gampong* yang tercantum dalam “Proposal Pembentukan Gampong Ketibung Musara” (Pemerintah Kecamatan Serbajadi, 2007) mencatat bahwa keseluruhan jumlah penduduk Ketibung Musara sekarang adalah 581 jiwa yang terbagi ke dalam penduduk Dusun Ketibung 111 jiwa, Dusun Karang Indah 376 jiwa, dan Jamur Batang 94 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk Ketibung Musara belum kembali (bandingkan dengan Tabel 5). Beberapa informasi menjelaskan bahwa sebagian dari mereka

kini tinggal di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Riau (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008). Mereka tinggal menetap di sana karena sudah berhasil mengembangkan kehidupannya. Meskipun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah berkali-kali mengimbau melalui surat kabar untuk meminta mereka kembali, namun tidak banyak yang memenuhi panggilan tersebut.

Tabel 5. Komposisi Penduduk Gampong (Persiapan) Ketibung Musara

No.	Kategori Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5	175	159	334
2.	6-10	151	148	299
3.	11-25	235	241	476
4.	26-54	159	178	337
5.	> 54	33	25	58
Jumlah		753	751	1504

Sumber: Pemerintah Kecamatan Serbajadi, 2007.

Keterangan: Data ini berasal dari catatan kependudukan sebelum penduduk mengungsi akibat konflik antara TNI/POLRI dan GAM.

Bahkan, sebanyak 20% dari penduduk Gampong Ketibung Musara sekarang merupakan pendatang. Para pendatang ini masuk dan mau tinggal di *gampong* ini berdasarkan hasil pendekatan atau permintaan tokoh masyarakat dan aparat *gampong*. Upaya mengundang para pendatang tersebut didasari kenyataan keberadaan 12.000 ha lahan pertanian (terlantar) di wilayah *gampong* ini. Makin banyak penduduk makin banyak areal lahan yang dapat dikelola dan makin besar juga kemungkinan untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Bagaimanapun, proses ini memperlihatkan bahwa penduduk *gampong* ini memiliki sikap terbuka terhadap orang luar. Komunitas yang terbuka terhadap para pendatang umumnya cenderung terbuka juga terhadap pengetahuan, tata cara, dan perilaku baru yang datang dari luar.

Konflik yang terjadi pada masa lalu memang telah membuat sendi-sendi kehidupan masyarakat mengalami gangguan serius. Karena konflik tersebut, banyak remaja putus sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Mereka yang kini tergolong remaja banyak yang tidak tamat sekolah dasar. Jumlah mereka cukup besar, diperkirakan mencapai separuh dari kelompok remaja di *gampong* ini (FGD Sebab-Akibat Kemiskinan, Kelompok Remaja, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008). Sekarang anak-anak keluarga kaya mampu bersekolah sampai tingkat SMP, bahkan sekolah menengah tingkat atas (SMA), anak-anak keluarga sedang dapat mencapai tingkat SMP, sementara anak-anak keluarga miskin hanya mampu sampai SD, bahkan ada yang tidak tamat. Untuk mengikuti pendidikan SMP dan SMA yang terdekat anak-anak harus pergi ke Gampong Peunaron yang jaraknya 10 km dari *gampong* mereka. Sebagian anak bersekolah SMP dan SMA di Kota Langsa yang berjarak 85 km. Jarak yang begitu jauh memaksa mereka tinggal bersama kerabat atau menyewa kamar di kota tersebut. Dengan keadaan seperti ini, keluarga miskin tidak akan mampu menyediakan biaya transportasi dan makan bagi anak-anaknya untuk bersekolah ke luar *gampong*.

Kondisi pelayanan kesehatan bagi penduduk Gampong Ketibung Musara lebih parah dibanding dengan pelayanan pendidikan. Tidak ada sarana dan tenaga kesehatan yang menetap di *gampong* ini, kecuali dukun (penyakit dan beranak). Dengan frekuensi sekali sebulan, kadang-kadang beberapa bulan, penduduk dapat mengakses posyandu dan penyuluh kesehatan (FGD Diagram Venn dan Sumber Informasi, Kelompok Ibu, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008). Puskesmas terdekat berjarak 10 km, sementara rumah sakit berjarak 85 km. Oleh karena itu, meskipun keluarga miskin mempunyai kartu sehat, mereka dapat dikatakan tidak

pernah memanfaatkannya. Keengganan menggunakan kartu sehat itu ditambah dengan kerap munculnya cerita bahwa pelayanan terhadap pemegang kartu sehat tidak mampu menyembuhkan dan kasar (FGD Evaluasi Program Bantuan, Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008). Dalam keadaan darurat sangat sulit bagi penduduk untuk mendapat pelayanan memadai, apalagi di *gampong* ini belum tersedia pelayanan transportasi yang reguler. Akhirnya, kalau sakit penduduk kembali ke dukun dan untuk penyakit-penyakit tertentu, mereka cukup membeli obat di warung.

Rendahnya akses dan pengetahuan penduduk terhadap pentingnya hidup sehat terlihat dari perilaku mereka dalam BAB. Penduduk memanfaatkan kebun sebagai ruang terbuka atau sungai untuk BAB. Akibat kebiasaan seperti itu, suatu hal yang sangat biasa bila di halaman rumah mereka sering tercium aroma tidak sedap. Penduduk sudah terbiasa dan tidak terganggu dengan bau seperti itu. Lingkungan yang tidak sehat itu telah menimbulkan dampak buruk. Setiap tahun datang musim berjangkitnya penyakit yang berbasis lingkungan, seperti muntaber (muntah-berak), diare, dan batuk. Di *gampong* ini pernah berjangkit diare yang memakan banyak korban. Dalam satu hari satu keluarga yang terdiri seorang ibu dengan lima anaknya meninggal. Kematian mereka terjadi secara berturut-turut hanya dalam bilangan jam.

Dari segi pekerjaan, keterampilan penduduk Gampong Ketibung Musara relatif terbatas. Pekerjaan utama mereka adalah bertani secara tradisional, baik pada tanaman perkebunan maupun tanaman pangan. Secara umum tidak terlihat perbedaan pekerjaan antara kelompok miskin dengan menengah dan kaya. Di samping disebabkan oleh lebih dari 80% penduduknya tergolong miskin, perbedaan antara kelas kesejahteraan dalam kegiatan dan penampilan hidup sehari-hari relatif tidak berbeda. Dalam keterbatasan mata pencaharian tersebut, komunitas ini dapat dikatakan tidak pernah mendapat kunjungan dari PPL. Selain keterampilan bertani, sebagian penduduk mempunyai tambahan keterampilan membuat tikar (kelompok ibu), merajut jala, dan membuat perahu. Keterampilan yang mereka miliki diperoleh secara turun-temurun. Berbagai produk dari hasil keterampilan tambahan tersebut umumnya hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan sendiri, belum terlihat adanya usaha menghasilkan sesuatu untuk pasar, bahkan produk pertanian pun masih cenderung bersifat subsisten (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008).

Sebagian generasi muda memiliki keterampilan mengoperasikan alat berat untuk melaksanakan berbagai kegiatan di bidang perkebunan. Kelompok ini adalah mereka yang bekerja atau pernah bekerja di beberapa perkebunan yang berada di sekitar Gampong Ketibung Musara (FGD Sebab-Akibat Kemiskinan, Kelompok Remaja, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008). Kenyataan seperti ini memberi peluang bagi berbagai pemangku kepentingan pembangunan untuk memperbanyak jenis dan kegiatan latihan kerja bagi penduduk, khususnya generasi muda di pedesaan. Balai Latihan Kerja (BLK), misalnya, perlu dirancang agar dapat dan mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.

3.2 Kondisi Sumber Daya Alam

Gampong ini memiliki sumber daya alam yang cukup beragam, yakni berupa lahan dengan berbagai jenis peruntukannya, hutan dengan berbagai hasilnya, keragaman flora dan fauna, bahan galian tambang, serta sungai dan air terjun. Berbagai sumber daya tersebut belum banyak yang didayagunakan penduduk karena keterbatasan modal dan penguasaan teknologi. Hutan di *gampong* ini, misalnya, merupakan hutan heterogen yang lebat. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur. Dari hutan heterogen ini sebagian penduduk, terutama kelompok miskin, juga menggantungkan penghasilannya, antara lain, dengan mencari rotan, getah damar, gambir, dan

juga madu lebah hutan. Kegiatan tersebut biasa dilakukan pada saat mereka tidak sedang mengerjakan ladang atau tidak sedang mengerjakan pekerjaan *ongkosan*. Bukan hanya keragaman flora yang tumbuh di hutan tetapi juga fauna. Hutan di *gampong* ini merupakan habitat bagi berbagai jenis fauna. Di antara jenis fauna ini ada yang masih merupakan binatang buruan seperti rusa, meski sesungguhnya binatang tersebut sudah berstatus langka dan dilindungi oleh peraturan perundangan.

Keistimewaan lain *gampong* ini adalah ia merupakan lintasan periodik gajah. Jumlahnya cukup banyak berkisar antara 40–50 ekor. Gajah-gajah tersebut bahkan pernah tinggal cukup lama di *gampong* ini, yaitu pada saat penduduk mengungsi dan *gampong* berubah menjadi semak belukar. Kini gajah-gajah tersebut paling tidak 3 bulan sekali melintas dan tinggal di sekitar *gampong* ini selama 1 minggu. Dalam beberapa kejadian gajah memakan pucuk daun sawit; akibatnya, pohon sawit lambat laun akan mati. Selain itu, gajah juga sering mendorong pohon pinang sampai roboh. Bagi penduduk kehadiran kumpulan gajah sangat merugikan. Tetapi, sejauh ini gajah belum pernah mencenderai manusia. Penduduk biasanya mengusir dengan cara baik, agar kumpulan gajah pergi dan tidak merusak harta benda mereka. Apabila dihalau dengan cara kasar atau dengan cara menyakiti, gajah justru akan mengamuk dan menimbulkan kerusakan parah (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008).

Keragaman flora dan fauna yang ada di hutan dimaknai sebagai rahmat oleh masyarakat. Semua isi hutan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mereka. Sebaliknya, ada juga penghuni hutan yang dipandang sebagai kendala bagi upaya mendapatkan penghasilan. Gajah dan babi hutan, misalnya, dilihat sebagai pengganggu upaya mengembangkan perkebunan dan pertanian. Penduduk belum melihat semua itu sebagai potensi ekonomi. Sesungguhnya kalau mereka bisa bermitra dengan pihak lain dalam upaya mengembangkannya menjadi obyek wisata, kehadiran gajah dapat menjadi sumber penghasilan. Sekarang ini pada setiap kehadiran gajah, penduduk hanya berharap dan berusaha mengusir mereka agar cepat pergi. Dalam persoalan gajah ini, aparat desa berharap pemerintah mau turun tangan untuk membantu mencari pemecahannya.



Dok. SMERU

Gambar 5. Ikan *Labedu* sumber gizi dan penghasilan

sebagai sumber air pada saat kontraktor membangun gedung sekolah dengan menggunakan pipa ke proyek. Namun, ketika pembangunan selesai, pipa air dengan sistem grafitasi tersebut dibongkar. Di pihak lain, debit air terjun yang lokasinya jauh dari permukiman jauh lebih besar

Sungai Bunin dan anak-anaknya yang melintasi *gampong* ini merupakan sumber daya yang penting bagi penduduk. Mereka biasa menangkap ikan *labedu* yang oleh penduduk dinilai sebagai ikan yang lezat. Ikan jenis ini biasanya ditangkap beberapa hari sesudah sungai banjir. Selain Sungai Bunin yang cukup besar dengan aliran yang deras, di *gampong* ini terdapat dua air terjun. Satu di antaranya berlokasi dekat dengan permukiman Dusun Karang Indah, sedangkan satu lainnya dapat dicapai dengan perahu selama 3 jam perjalanan. Di musim kemarau, debit air terjun yang berlokasi di dekat permukiman lebih kurang 2 liter/detik dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk dusun, sepanjang dapat diatur penggunaannya secara baik. Air terjun ini pernah dimanfaatkan

dan sampai saat ini belum dimanfaatkan. Sumber daya alam lainnya adalah keberadaan bahan galian (tambang) yang diduga mengandung timah hitam. Selain itu, ditemukan juga batu-batuan selong. Kedua bahan galian ini sampai sekarang belum dimanfaatkan.

Lahan di Gampong Ketibung Musara merupakan sumber daya alam yang potensial dengan beragam jenis tanaman yang tumbuh subur. Tabel 6 memberi gambaran tentang penggunaan lahan. Lebih dari 80% lahan masih belum dimanfaatkan. Menurut *keuchik* (kepala *gampong*), seluas 5.000 ha di antaranya sedang diusulkan menjadi salah satu proyek revitalisasi perkebunan. Melalui proyek ini diharapkan penduduk akan memperoleh pembagian beberapa ha tanah yang akan ditanami kelapa sawit dengan dana pinjaman. Penduduk wajib mengembalikan pinjamannya dengan mencicil ketika kebun mereka sudah menghasilkan. Apabila rencana ini terealisasi, maka dalam jangka 5–10 tahun ke depan kesejahteraan penduduk akan menjadi jauh lebih baik (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008).

Tabel 6. Peruntukan Lahan di Gampong Ketibung Musara

No.	Peruntukan	Luas (Ha)
1.	Persawahan	80
2.	Pekarangan	112
3.	Perkebunan rakyat	120
4.	Perkebunan kelompok sawit rakyat	45
5.	Kebun belum dikerjakan	12.049
6.	Tanah aliran (sungai)	10
7.	Tanah hutan lindung	2.585
Jumlah		15.000 ha

Sumber: Pemerintah Desa Gampong Ketibung Musara, 2008.

3.3 Kondisi Infrastruktur

Tiga dusun di Ketibung Musara pada masa lalu kerap terlupakan oleh pemerintahan Gampong Bunin (induknya). Hal itu disebabkan jaraknya yang jauh sekitar 20 km dari pusat *gampong* induk. Dapat dikatakan tidak ada infrastruktur umum peninggalan masa pemerintahan *gampong* induk, kecuali jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Lwes. Jalan provinsi ini melintasi Sungai Bunin dan anak-anaknya yang ada di wilayah *gampong* ini. Karena sungai tersebut lebar dan berair deras dengan ketinggian dari muka air lebih kurang 15–20 m, dibangun dua buah jembatan baja yang kokoh dengan konstruksi *callender hamilton*.

Rumah penduduk terkonsentrasi di tiga dusun dan berada di kiri-kanan jalan provinsi, sementara beberapa yang di antaranya berada di kebun/ladang merupakan rumah pondok yang berukuran kecil. Beberapa rumah di Dusun Ketibung berada di kiri-kanan jalan setapak, sedikit menjorok ke dalam menuju kebun. Sampai saat ini, jumlah rumah penduduk belum sebanyak seperti keadaan sebelum konflik (sebelum 2000), sebab masih banyak penduduk yang belum kembali. Pada saat konflik mereka meninggalkan rumah dan sebagian rumah dibakar oleh pihak-pihak yang berkonflik. Rumah-rumah yang tidak dibakar menjadi lapuk, tertutup, dan ditumbuhi semak belukar. Kini di ketiga dusun tersebut terdapat 219 rumah sederhana, sementara penduduk yang kembali dari mengungsi baru 123 KK (lihat Gambar 6).

Sekembali dari pengungsian, kelompok penduduk yang pertama pulang kampung diberi bantuan panel surya beserta baterai (*accu*) untuk instalasi listrik skala rumah tangga atau PLTS. Terdapat 49 rumah di Dusun Karang Indah yang memperoleh bantuan PLTS, sementara rumah di dua dusun lainnya belum mendapat bantuan. Satu panel surya dan satu baterai dapat

menyalakan dua lampu dengan kapasitas masing-masing 10 watt. Kebanyakan rumah berupa rumah panggung dengan dinding dan lantai terbuat dari kayu, sedangkan atapnya bervariasi, terbuat dari rumbia atau seng.



Gambar 6. Rumah yang tergolong baik (kiri) dan yang ditinggal mengungsi (kanan)

Sungai Bunin dan anak-anaknya yang melintasi *gampong* ini merupakan sumber air utama untuk minum dan masak, mandi, dan mencuci pakaian. Semua keluarga menggantungkan sumber air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Penduduk belum mengenal pemanfaatan sarana sumur sebagai sumber air bersih. Persoalan yang dihadapi penduduk adalah bahwa tingkat kebersihan air sungai tidak lagi terjamin sebab sungai juga menampung sisa-sisa pupuk dan pestisida dari lahan pertanian yang terbawa air hujan. Sekalipun sudah ada larangan, sungai seringkali juga masih menjadi tempat BAB karena tidak satu pun rumah penduduk yang mempunyai jamban. Selain itu, di bawah dapur setiap rumah penduduk selalu terlihat genangan air limbah rumah tangga yang terbuka. Penduduk belum mengenal sistem sanitasi dasar yang sehat. Akibatnya, *gampong* ini setiap tahun, terutama di musim kemarau, menghadapi “musim penyakit” (tentang persoalan yang sama lihat juga uraian di Bagian 3.1).

Setelah konflik TNI/POLRI dan GAM berakhir melalui penandatanganan kesepakatan damai pada 2005, Gampong Ketibung Musara mendapat bantuan pemerintah berupa gedung sekolah. Bangunan yang terdiri dari tiga lokal ini berlokasi di Dusun Karang Indah dan dipakai untuk menyelenggarakan SD (swasta) dengan tingkat belajar sampai kelas 6. Keputusan menempatkan gedung SD tersebut di dusun ini diambil dengan pertimbangan lokasinya berada di antara dua dusun lainnya, yaitu Ketibung dan Jamur Batang. Di sekitar gedung sekolah ini rencananya juga akan dibangun kantor pemerintahan *gampong* dan pustu.

Infrastruktur sosial lainnya yang tersedia adalah *meunasab* (musala) yang terdapat di setiap dusun. Secara umum bentuk *meunasab* di *gampong* ini sederhana dengan bahan bangunan dari papan dan beratap seng. Selain tiga *meunasab* tersebut penduduk tiga dusun secara bersama dan berswadaya telah membangun sebuah masjid yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian, namun sudah dipakai untuk berbagai kegiatan keagamaan, terutama sembahyang Jumat. Penduduk sudah meminta bantuan penyelesaian bangunan masjid ini kepada Dinas Syari’ah Kabupaten Aceh Timur, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

Lokasi pembangunan masjid tersebut agak menyimpang dari kesepakatan umum untuk membangun sarana umum di Dusun Karang Indah yang terletak di pusat wilayah Gampong Ketibung Musara. Masjid ini berlokasi antara Dusun Ketibung dan Dusun Karang Indah. Penduduk dua dusun ini memang dapat menempuh jarak yang sama untuk pergi ke masjid,

tetapi penduduk Dusun Jamur Batang berjarak dua kali lipat dibanding penduduk kedua dusun lainnya. Tidak muncul cerita konflik menyangkut lokasi masjid ini, tetapi ada cerita bahwa di Dusun Jamur Batang akan dibangun sebuah pesantren. Agaknya, rencana penempatan pesantren di Dusun Jamur Batang ini merupakan kearifan lokal dalam rangka meredam konflik, baik yang telah terjadi maupun yang mungkin terjadi di masa depan.

3.4 Kondisi Ekonomi dan Keuangan

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa mayoritas penduduk Ketibung Musara termasuk dalam kategori miskin. Sampai saat ini, kondisi penghidupan mereka masih belum pulih setelah mengalami penurunan drastis karena memanasnya konflik antara GAM dengan TNI/POLRI sejak 2000. Bisa dikatakan, saat ini mereka sedang mengonsolidasikan aset-aset yang terbengkalai selama di tinggal mengungsi. Tentu saja usaha membangun kembali sawah, ladang, dan kebun tersebut memerlukan banyak dana dan tenaga. Karena belum bisa mendapatkan penghasilan yang pasti dari kegiatan pertanian milik mereka sendiri, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penduduk, terutama keluarga miskin, bekerja serabutan (*ongkosan*). Pekerjaan *ongkosan* di *gampong* ini ada beberapa jenis dengan sistem sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Pekerjaan *Ongkosan* dan Sistem Pengupahannya

No.	Jenis <i>Ongkosan</i>	Sistem Pengupahan
1.	<i>Ongkosan</i> harian (buruh harian)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upah Rp40.000/hari untuk laki-laki ▪ Upah Rp20.000/hari untuk perempuan
2.	Borongan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodos sawit (dihitung/Kg) → upah Rp300/Kg (1 hari bisa mendodos sampai 300 Kg) ▪ Ngimas → upah Rp70.000/ha ▪ Menderes bagi hasil 50% penderes, 50% pemilik

Sumber: FGD Analisis Sumber Mata Pencaharian, Kelompok Ibu dan kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 29 Juli 2008.

Meskipun hasil *ongkosan* cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi pekerjaan ini tidak tersedia setiap hari. Sampai sekarang permintaan tenaga kerja untuk *ongkosan* lebih kecil dibanding jumlah tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Dalam hal tidak ada pekerjaan *ongkosan*, penduduk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari hasil hutan (rotan, damar, gambir, madu), menangkap ikan, menarik ojek, atau mencari *rempengan* (barang bekas).

Pekerjaan *ongkosan* dan bertani sebagai pekerjaan utama biasanya dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, tetapi tanggung jawab dan beban kerja lebih banyak pada kaum laki-laki (FGD Analisis Gender dan FGD Kalender Harian, Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008). Jenis pekerjaan mencari hasil hutan, menarik ojek, dan mencari ikan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Jenis pekerjaan sampingan yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan adalah mencari barang bekas (lebih banyak dilakukan perempuan) dan mencari damar (lebih banyak dilakukan oleh laki-laki).

Penghasilan rumah tangga miskin bersumber dari segenap anggota keluarga dewasa, yaitu bapak, ibu, dan anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini terlihat bahwa menurut kelompok miskin remaja ikut terbebani untuk bekerja mencari nafkah, bahkan sejak kanak-kanak. Berbeda dengan keluarga miskin, pada keluarga kaya yang menyumbang

pendapatan rumah tangga hanya bapak dan ibu. Anak laki-laki ada juga yang bekerja, tetapi hasilnya dipakai sendiri, sedangkan anak perempuan bekerja membantu ibu mengurus rumah. Namun, menurut kelompok ibu miskin, anak mereka menyumbang juga pada kebutuhan rumah tangganya. Baik rumah tangga keluarga miskin maupun kaya sama-sama tidak memperoleh kontribusi dari kakek maupun nenek yang tinggal bersama mereka. Artinya, kakek dan nenek tidak lagi bekerja mencari nafkah untuk keluarga (FGD Analisis Keuangan Rumah Tangga, Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 29 Juli 2008 dan lihat Tabel 8). Mereka tidak bekerja bukan semata-mata karena usianya, tetapi lebih disebabkan terbatasnya lapangan kerja di *gampong* yang baru terlepas dari suasana konflik yang membuat mereka selama bertahun-tahun tidak bisa bekerja dengan aman. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa banyak bapak-ibu yang sudah mempunyai cucu, selama mereka tidak tinggal dengan anaknya, tetap bekerja.

Tabel 8. Pendapatan dan Kontribusi Anggota Keluarga

Anggota Keluarga	Kakek Nenek	Ayah	Ibu	Anak Laki-laki	Anak Perempuan
Pendapatan					
Kelompok bapak kaya	-	60%	20%	20%	-
Kelompok ibu kaya	-	80%	20%	-	-
Kelompok bapak miskin	-	75%	20%	5%	-
Kelompok ibu miskin	-	70%	20%	5%	5%
Kontribusi bagi keperluan rumah tangga					
Kelompok bapak kaya	-	80% (48)	100% (20)	(0)	-
Kelompok ibu kaya	-	100% (80)	60% (12)	-	-
Kelompok bapak miskin	-	80% (60)	100% (20)	-	-
Kelompok ibu miskin	-	75% (52,5)	100% (20)	50% (2,5)	80% (4)
Simpanan anggota keluarga					
Kelompok bapak kaya	-	20% (12)	(0)	100% (20)	-
Kelompok ibu kaya	-	0% (0)	40% (8)	-	-
Kelompok bapak miskin	-	20% (15)	-(0)	100%	-
Kelompok ibu miskin	-	25% (17,5)	-	50% (2,5)	20% (1)

Sumber: FGD Analisis Keuangan Rumah Tangga, Kelompok Ibu dan kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 29 Juli 2008.

Di Gampong Ketibung Musara tidak terdapat lembaga keuangan, baik yang formal seperti bank dan pegadaian maupun yang informal seperti rentenir dan lembaga kredit mikro yang biasanya merupakan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penduduk, terutama keluarga miskin, apabila mengalami kesulitan keuangan akan meminjam kepada saudaranya atau tetangganya (yang kebanyakan juga miskin). Mereka melakukan itu untuk sesuatu yang sangat penting atau darurat seperti untuk berobat. Dalam jumlah yang sangat terbatas, mereka dapat berutang kebutuhan bahan makan-minum sehari-hari (sembilan bahan pokok/sembako) di warung. Di setiap dusun di *gampong* ini hanya ada paling banyak dua warung.

Masyarakat dengan pola kehidupan perkebunan cenderung memerlukan modal kerja relatif besar untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Masyarakat Ketibung Musara merupakan contoh dari sebuah komunitas perkebunan yang memerlukan bantuan dana dan teknologi dari luar. Mereka mengharapkan masuknya program revitalisasi pertanian (perkebunan) ke *gampong* mereka. Selain itu, sasaran program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) adalah tepat

kalau diarahkan untuk lebih mengutamakan komunitas seperti Gampong Ketibung Musara ini. Ketika mendengar bahwa PNPM akan masuk ke *gampong* ini, para ibu segera bersiap menyambutnya dengan membentuk kelompok usaha perempuan.

3.5 Kondisi Modal Sosial

Telah diuraikan di muka bahwa penduduk Ketibung Musara homogen. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang dilaksanakan bisa melibatkan anggota masyarakat secara luas dan di antara anggota masyarakat dapat dikatakan tidak pernah terjadi ketegangan sosial yang berarti. Di *gampong* ini terdapat beberapa kelompok sosial/keagamaan yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan sifat dan tujuannya. Kegiatan-kegiatan itu merupakan media bagi penduduk untuk bersosialisasi. Karena ada kegiatan bersama itu, maka kohesivitas sosial dapat terbangun dan dapat menghilangkan berbagai sekat sosial. Di *gampong* ini, misalnya, tidak ada perbedaan antara pendatang dan penduduk asli. Para pendatang bisa membaaur sepenuhnya dengan penduduk asli dan ikut aktif dalam berbagai kegiatan sosial/keagamaan tanpa hambatan apapun (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 29 Juli 2008).

Di Gampong Ketibung Musara, jumlah kelompok sosial/keagamaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat belum beragam. Kelompok wirid Yasin, misalnya, terdiri dari kelompok wirid Yasin laki-laki yang mengadakan kegiatan setiap malam Jumat, dan kelompok wirid Yasin perempuan melaksanakan kegiatan pada hari Jumat pagi. Kelompok-kelompok wirid Yasin ini melaksanakan kegiatan keagamaan dengan membaca Yasin bersama dan juga pendalaman pengetahuan agama. Kelompok wirid Yasin ibu pada saat melaksanakan kegiatan wirid juga mengadakan arisan. Selain itu, di setiap dusun terdapat kelompok kesenian adat berupa *didong* (pantun bersaut), tari saman, dan tari *bines*.

Kegiatan lain yang cukup menonjol adalah gotong-royong. Dalam hal ini penduduk secara bersama melaksanakan kegiatan, baik untuk kepentingan *gampong* (publik) maupun individu, tanpa memperoleh upah dari pekerjaan itu. Kegiatan gotong-royong, antara lain, dilaksanakan dalam rangka bersih *gampong*, membangun sarana umum, dan menanam/memanen padi. Pada saat membangun masjid, misalnya, masyarakat bukan hanya bergotong-royong melaksanakan pembangunan fisiknya, tetapi juga bersama-sama menanggung pembiayaannya. Secara umum masyarakat Ketibung Musara mempunyai cukup banyak pengalaman dalam mengorganisasi diri dan pengalaman tersebut merupakan modal penting dalam rangka membangun kesejahteraan bersama yang lebih baik.

Adat di *gampong* ini merupakan sesuatu yang tidak terlembagakan dengan ketat. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur kehidupan sehari-hari penduduk dan tidak terlihat adanya struktur organisasi adat. Adat tidak mempunyai wilayah tertentu yang dikukuhkan dengan hukum (adat), seperti wilayah atau tanah adat/ulayat. Dalam masyarakat hanya ada beberapa *tetua* adat yang dipimpin oleh seorang khalifah yang dipilih. *Tetua* adat menjadi tempat warga meminta nasihat, terutama menyangkut siklus kehidupan, yaitu pada peristiwa kelahiran, pernikahan, atau kematian. Adat juga mengatur tata pergaulan antaranggota masyarakat, walau tidak secara ketat. Peraturan yang masih dikenal, misalnya, muda-mudi dilarang berdua-duan bila bukan muhrim. Larangan ini sebenarnya lebih didasarkan pada aturan agama. Penggunaan sarana mandi, cuci, dan mengambil air di sungai dilakukan secara bergantian antara laki-laki dan perempuan.

Usia pernikahan anak perempuan, sebagaimana tertuang dalam lirik lagu yang mengiringi tarian *bines*, diajarkan paling tidak sesudah tamat SMP. Penyebutan “tamat SMP” ini

memperlihatkan bahwa bagi masyarakat sebenarnya usia bukan satu-satunya pertimbangan untuk menikah, tetapi juga tingkat pendidikan. Pandangan seperti ini berimplikasi perlunya anak-anak mereka mengikuti pendidikan SMP, dan karenanya masyarakat mengharapkan adanya penyelenggaraan SMP di *gampong* ini.

Pada acara pernikahan biasanya dilakukan upacara khas masyarakat Gayo. Dalam upacara pernikahan selain dilakukan acara mengantar pengantin, selalu diadakan resepsi dengan mengundang seluruh tetangga dan sanak keluarga, termasuk yang berada di luar *gampong*. Kesenian adat seperti *didong*, tari saman, dan tari *bines* selalu ditampilkan dalam rangkaian upacara pernikahan.

Upacara yang juga melibatkan tata cara adat adalah upacara kematian. Sesungguhnya upacara ini tidak berbeda dengan komunitas lain penganut Islam. Upacara adat yang dimaksud adalah takziah di rumah keluarga orang yang meninggal. Kegiatan takziah yang agak khas Gayo adalah membaca tahlil selama 7 hari berturut-turut dan kemudian dilakukan lagi acara penutupan pada malam ke-44 setelah kematian.

IV. KERENTANAN DAN MEKANISME BERTAHAN

Bab ini membahas faktor-faktor kerentanan yang terdiri dari tiga hal, yaitu kejadian yang bersifat mengguncang, kejadian yang bersifat musiman, dan kejadian yang mempunyai kecenderungan tertentu dalam segmen waktu tertentu. Dalam menghadapi kejadian tersebut masyarakat mengembangkan berbagai upaya untuk menghindari atau mengurangi dampaknya dalam kehidupan mereka. Mekanisme bertahan hidup dalam suatu komunitas dapat terbentuk secara alamiah berdasarkan pengalaman puluhan bahkan ratusan tahun atau dapat juga terbentuk sebagai hasil pembelajaran (meniru) dari pengalaman komunitas lain.

4.1 Peristiwa yang Mengguncang

Peristiwa yang mengguncang sendi kehidupan masyarakat adalah suatu kejadian yang berada di luar kemampuan penduduk untuk mengontrolnya dan menimbulkan perubahan yang bersifat positif atau negatif secara cepat pada berbagai aspek kehidupan komunitas. Masyarakat Ketibung Musara mengalami dua kali peristiwa yang bersifat mengguncang, yaitu konflik bersenjata antara GAM dan TNI/POLRI yang memaksa penduduk *gampong* mengungsi dan bencana gempa bumi 2005, meskipun tidak terkena dampak tsunaminya.

Guncangan yang mencekam kejiwaan masyarakat adalah meningkatnya intensitas konflik antara TNI/POLRI dan GAM, terutama sejak 2000. Di satu sisi TNI/POLRI bertugas dan berkepentingan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara di sisi lain GAM menginginkan Aceh menjadi negara merdeka terpisah dari NKRI. Dusun Karang Indah merupakan medan pertempuran di masa konflik. Secara umum anggota GAM bergerak di hutan, karenanya TNI/POLRI pernah membombardir melalui udara dan menembaki dengan meriam berat dari darat areal hutan di wilayah Ketibung Musara. Namun, dalam kehidupan sehari-hari di permukiman tidaklah mudah bagi TNI/POLRI membedakan antara anggota GAM dan penduduk biasa. Dalam upaya mencari informasi tentang siapa dan di mana anggota GAM berada, pasukan TNI/POLRI kerap kali bertindak kasar, bahkan menyiksa penduduk. Sebaliknya, anggota GAM juga melakukan kekerasan yang sama kepada penduduk yang diduga memberikan informasi atau menjadi mata-mata TNI/POLRI (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008).

Dalam situasi seperti itu, tentu saja penduduk tidak memiliki rasa aman untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani/pekebun yang lokasinya secara umum berada di luar wilayah permukiman, di pinggir area hutan. Kehidupan mereka makin terhimpit ketika demi memudahkan pengamanan TNI/POLRI memerintahkan semua penduduk untuk mengungsi. Mereka ditempatkan di tenda-tenda, antara lain, di Gampong Peunaron yang terletak sekitar 10 km dari Gampong Ketibung Musara. Karena ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari terbatas, sementara kapan akan berakhirnya konflik tidak dapat diperkirakan, makin lama makin sulit bagi pengungsi memperoleh makanan yang memadai dan pendidikan anak-anak mereka pun terbengkalai. Oleh karena itu, banyak penduduk yang mencari pekerjaan keluar, bahkan sampai ke Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Riau. Mereka meninggalkan begitu saja rumah dan lahan usahanya di *gampong*.

Intensitas konflik mulai menurun sejak 2004 dan makin membaik sejak kesepakatan damai di Helsinki dirintis dan ditandatangani pada 2006. Ketika kondisi mulai aman, satu persatu penduduk kembali ke *gampong*. Namun, mereka yang mengalami kekerasan, baik yang dilakukan oleh TNI/POLRI maupun GAM, sampai sekarang masih banyak yang takut pulang.

Begitu juga dengan mereka yang mempunyai usaha yang sudah cukup berkembang di rantau kelihatannya tidak berminat lagi untuk kembali ke kampung halamannya. Sampai sekarang kurang dari separuh pengungsi yang pulang kampung (Pemerintah Kecamatan Serbajadi, 2007). Mereka yang pulang pun ternyata menghadapi hambatan berat dalam menata penghidupan. Setelah beberapa tahun ditinggal, *gampong* mereka menjadi semak belukar, rumah-rumah banyak yang rusak karena lapuk atau dibakar oleh pasukan TNI/POLRI maupun oleh anggota GAM. Pada mulanya penduduk bolak-balik dari tempat pengungsian ke *gampong* mereka untuk merintis penghidupan baru dengan membenahi rumah dan lahan pertanian. Untuk merintis kehidupan komunitas yang dapat berfungsi secara ekonomi dan sosial, mereka harus berkerja keras. Sampai sekarang upaya mereka masih berada pada tahap pemulihan. Tingkat kesejahteraan mereka belum kembali seperti sedia kala, namun mereka optimis akan memperoleh penghidupan yang makin membaik dalam beberapa tahun ke depan. Sekitar 50% dari anak-anak, termasuk muda-mudi, belum kembali bersekolah dan belum tersedia program bantuan pendidikan bagi mereka (FGD Sebab-Akibat Kemiskinan, Kelompok Remaja, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008).

Guncangan lain yang dialami masyarakat meskipun tidak terlalu berdampak pada kehidupan mereka adalah gempa bumi pada 2005. Guncangan gempa tersebut sangat kuat sehingga tebing di pinggir Sungai Bunin longsor dan hampir menyumbat alur sungai. Air sungai, terguncang hebat bahkan beberapa perahu terlempar sejauh 20 m dari sungai. Guncangan gempa yang dahsyat dialami penduduk dan membuat panik, tetapi akibat tsunami yang ditimbulkannya tidak sampai ke Gampong Ketibung Musara karena lokasinya di wilayah pegunungan yang berada lebih dari 300 m di atas permukaan laut. Namun, berita tentang kerusakan besar yang terjadi di berbagai tempat di Provinsi NAD membuat mereka, paling tidak secara psikis, terpukul, ditambah lagi konflik antara TNI/POLRI dan GAM belum sepenuhnya berakhir. Kemiskinan dan kurangpedulian pemerintah terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat *gampong*, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, bantuan dan bimbingan usaha pertanian/perkebunan dapat menjadi sumber berkembangnya generasi baru GAM.

4.2 Peristiwa Musiman

Peristiwa musiman pada dasarnya merupakan kejadian yang bersifat berulang dari tahun ke tahun sehingga penduduk menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, meskipun memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Terdapat beberapa peristiwa musiman yang dialami masyarakat Ketibung Musara yang berpengaruh cukup nyata pada penghidupan mereka.

4.2.1 Penyakit

FGD Kalender Musiman (Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008) mengungkapkan bahwa setiap tahun penduduk menghadapi masa-masa berjangkitnya penyakit. Beberapa jenis penyakit yang selalu berulang adalah (i) sakit gembung pada anak karena cacingan yang terjadi pada Oktober, November, dan Desember (musim penghujan) dan (ii) demam/panas dan diare yang terjadi pada Februari, Maret, April, dan Mei (musim kemarau). Jadi, selama 7 bulan dalam setahun penduduk menghadapi penyakit yang relatif sama. Bagi dunia kesehatan modern, penyakit-penyakit tersebut tergolong jenis penyakit yang mudah diantisipasi atau diobati. Persoalannya, di *gampong* ini penduduk hanya mempunyai pilihan pelayanan kesehatan tradisional (dukun), sementara pelayanan kesehatan modern terdekat berada 10 km dari *gampong* mereka.

Di Dusun Ketibung (nama tiga dusun ketika masih bergabung dengan Gampong Bunin) pada 2006 pernah terjadi wabah penyakit yang menelan banyak korban (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008). Wabah penyakit tersebut sempat membuat masyarakat ketakutan. Pasalnya terdapat satu keluarga yang enam anggota keluarganya meninggal pada hari yang sama akibat penyakit tersebut. Hal ini terkait erat dengan kesehatan lingkungan yang buruk. Di *gampong* ini, sanitasi lingkungan memang belum memperoleh perhatian. Penduduk buang hajat di semak belukar atau di sungai, padahal sungai juga menjadi sumber air bersih bagi mereka. Buangan limbah cair bekas memasak tidak disalurkan dengan sistem drainase yang aman dan sehat sehingga tetap menggenang di bawah dapur. Bila malam hari BAB pun kerap kali dilakukan di dapur, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Berjangkitnya wabah penyakit yang berbasis kesehatan lingkungan, antara lain, diare, iritasi mata, sakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut (ispa) berdampak pada menurunnya produktivitas kerja yang pada gilirannya berpengaruh pula pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan lingkungan yang buruk apabila tidak dibenahi akan menyebabkan berulangnya peristiwa yang sama. Sampai saat ini masalah kesehatan lingkungan tersebut masih belum memperoleh perhatian memadai, khususnya oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, belum ada perubahan pandangan masyarakat, mereka masih mempraktikkan perilaku hidup yang tidak sehat.

4.2.2 Hama Binatang

Di Gampong Ketibung Musara terdapat berbagai hama binatang yang merusak ladang dan kebun penduduk (FGD Kalender Musiman, Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008). Di antaranya yang utama adalah gajah yang kerap kali memakan pucuk daun/umbut pohon sawit dan merobohkan pohon pinang. Kehadiran gajah di *gampong* ini sekitar 3 bulan sekali dengan waktu tinggal beberapa hari sampai beberapa minggu. Makin lama kumpulan gajah berada di sekitar *gampong*, makin banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Aparat pemerintah *gampong* sudah sering melaporkan persoalan gangguan gajah ini kepada pemerintah kabupaten, tetapi belum pernah ada bantuan untuk mencari jalan keluarnya. Laporan aparat *gampong* dinilai sejauh ini belum dipedulikan oleh pemerintah.

Hama lain adalah babi hutan dan monyet yang memakan berbagai jenis tanaman, antara lain, buah cokelat, padi ladang, dan palawija. Biasanya babi dan monyet datang merusak kebun dan ladang pada Maret, Mei, Juli, September, dan Desember. Secara umum waktu serangan hama tersebut berinterval 2 bulan sekali.

4.2.3 Musim Tanam, Panen/Petik

Pada September, penduduk mulai menanam tanaman pangan, terutama padi ladang dan palawija. Waktu menanam sampai ke masa panen berlangsung selama 5–6 bulan. Panen dilakukan pada Januari/Februari yang merupakan masa peralihan musim, yaitu penghujung musim hujan dan awal musim kemarau (FGD Kalender Musiman, Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008).

Musim petik buah berlangsung pada Juli sampai Desember. Sebagaimana hasil hutan, buah-buahan juga menjadi sumber penghasilan tambahan yang sebagian dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jenis buah dan masa petiknya adalah (i) cokelat pada Juli sampai Desember, (ii) rambutan pada Agustus, dan (iii) durian pada Juli dan Agustus.

Hasil hutan juga merupakan sumber penghasilan sampingan, terutama bagi keluarga miskin, yaitu pada saat mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan *ongkosan*. Hasil hutan yang cukup berarti dalam menambah penghasilan keluarga adalah rotan dan damar. Musim mencari rotan adalah pada Januari sampai Juni, sementara musim mencari damar pada April sampai Oktober. Tidak ada informasi mengenai besarnya hasil yang diperoleh dari mencari rotan, sedangkan hasil mencari damar biasanya sebanyak 10–20 kg per hari dengan harga Rp1.300/kg.

4.2.4 Banjir

Banjir biasanya terjadi antara Oktober sampai Desember (musim penghujan). Dahulu musim banjir membawa berkah karena penduduk mempunyai kesempatan menangkap ikan *labedu* yang jumlahnya berlimpah di sungai setiap sesudah banjir. Sekarang banjir menjadi makin besar akibat penebangan hutan di bagian hulu sehingga cenderung membawa banyak kerusakan (FGD Kalender Musiman, Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008).

4.2.5 Musim Sulit (Paceklik)

Selain musim-musim tersebut di atas, penduduk Gampong Ketibung Musara juga mengalami peristiwa musiman yang oleh mereka disebut *musim sulit*. Musim sulit adalah periode waktu di mana penduduk menghadapi berbagai tekanan hidup, penghasilan berkurang, dan bencana, khususnya sakit sering datang bersamaan. Musim sulit umumnya terjadi pada April sampai Juli. Pada periode waktu ini penduduk juga menyebutnya sebagai “musim berutang”, baik berupa uang pada keluarga atau tetangga maupun bahan makanan dan minuman di warung (FGD Kalender Musiman, Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008).

4.3 Peristiwa yang Bersifat Kecenderungan

Beberapa peristiwa yang bersifat kecenderungan yang terjadi di Gampong Ketibung Musara yang dilihat dengan cara membandingkan keadaan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan sekarang (Tabel 9). Secara umum terdapat kecenderungan perubahan yang membaik sejak 3 tahun terakhir, terutama pada aspek infrastruktur. Perbaikan kondisi kehidupan ini terkait erat dengan meredanya konflik antara TNI/POLRI dan GAM.

Tabel 9. Kecenderungan Perubahan di Gampong Ketibung Musara 10 Tahun Terakhir

Sarana atau kondisi	10 Tahun Lalu	5 Tahun Lalu	Keadaan Sekarang, 2008
1. Jalan	Kecil, belum di aspal, sudah ada jembatan	Besar dan sudah diaspal	Sudah diaspal, tetapi sudah rusak lagi di beberapa bagian
2. Transportasi	Jalan kaki	Naik RBT (ojek)	Sudah ada angkutan umum tetapi belum reguler
3. Sekolah	Belum ada	Belum ada	Sudah ada gedung sekolah
4. Listrik	Belum ada	Belum ada	Sudah ada PLTS bantuan BRR
5. Kebun	Ada tetapi tidak dirawat	Sudah dirawat tetapi tidak maksimal	Sudah dirawat dan ditanam tetapi produksi belum memadai.
6. Sarana ibadah	Belum ada masjid dan <i>meunasah</i>	Sudah ada <i>meunasah</i>	Selain <i>meunasah</i> sudah dibangun masjid
7. Pemerintahan <i>gampong</i>	Masih bagian Gampong Bunin	Masih bagian Gampong Bunin	Menjadi <i>gampong</i> persiapan Ketibung Musara
8. Jumlah penduduk	Karang Indah 32 KK Ketibung 28 KK Jamur Batang 18 KK	Semua penduduk mengungsi	Penduduk yang pulang dari pengungsian dan ditambah para pendatang 123 KK.

Sumber: FGD Analisis Kecenderungan, Kelompok Ibu dan Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008.



Gambar 7. Truk pengangkut kayu gelondongan

Jalan yang lebarnya kurang lebih 4 m, cukup untuk dua mobil berpapasan, merupakan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Luwes. Jalan ini di beberapa bagian rusak parah akibat sering dilewati kendaraan dengan tonase besar (lihat Gambar 7). Setiap hari *trailer-trailer* (truk Fuso) dengan ukuran besar melintas di *gampong* ini dengan muatan kayu gelondongan yang sebagian diduga merupakan hasil penebangan liar. Secara umum sarana transportasi lain untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah ini terus berkembang. Sepuluh tahun yang lalu penduduk masih berjalan kaki, kemudian tersedia RBT (ojek sepeda motor), dan sekarang tersedia kendaraan roda empat. Namun, sarana transportasi jenis terakhir ini tidak tersedia setiap waktu.

Pembangunan sarana ibadah memberi gambaran tentang kemandirian masyarakat dalam menyediakan infrastruktur *gampongnya*. Sepuluh tahun yang lalu di *gampong* ini sama sekali tidak ada sarana ibadah, kemudian penduduk mampu membangun *meunasab* (mushola) di setiap dusun berupa bangunan sederhana berukuran 6 x 8 meter yang terbuat dari kayu dan beratap seng. Sampai sekarang *meunasab* menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat dusun. Pada 2006/2007 gabungan penduduk ketiga dusun tersebut secara swadaya kembali berhasil membangun sebuah masjid. Masjid merupakan aset *gampong*, tempat masyarakat melakukan berbagai kegiatan keagamaan, terutama untuk melaksanakan salat Jumat.

Kemandirian masyarakat untuk membangun gedung SD tidak terlihat, sebagaimana pada pembangunan *meunasab* dan masjid. Kelihatannya masyarakat menempatkan urusan pembangunan SD sebagai sekadar urusan “dunia” yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan gedung sekolah memerlukan bantuan dari luar, khususnya pemerintah. Sekolah pertama di *gampong* ini baru dibangun pada 2006 dengan bantuan dana dari pemerintah melalui kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Gedung sekolah yang dibangun baru tiga ruangan, walaupun murid yang belajar sudah sampai kelas 6. Oleh karena itu, ruang belajar dan tenaga kependidikan di Gampong Ketibung Musara perlu segera ditambah, bukan hanya untuk murid umur SD, tetapi juga untuk remaja yang putus sekolah akibat mengungsi. Selain itu, BRR juga memberi bantuan berupa PLTS sebagai insentif bagi 45 keluarga warga Dusun Karang Indah yang merupakan kelompok pertama yang kembali ke kampung halaman dari pengungsian.

Sejak awal penduduk Ketibung Musara mengembangkan penghidupan mereka dengan berkebun. Di sela-sela mengurus kebunnya, mereka menanam padi dan palawija sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Potensi berkebun di *gampong* ini tergolong besar, selain wilayahnya yang luas dan subur, tersedia lahan yang belum diolah, sekitar 12.000 ha. Aparat *gampong* sedang berusaha meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menjadikan *gampong* mereka sebagai salah satu tempat pelaksanaan program revitalisasi perkebunan.

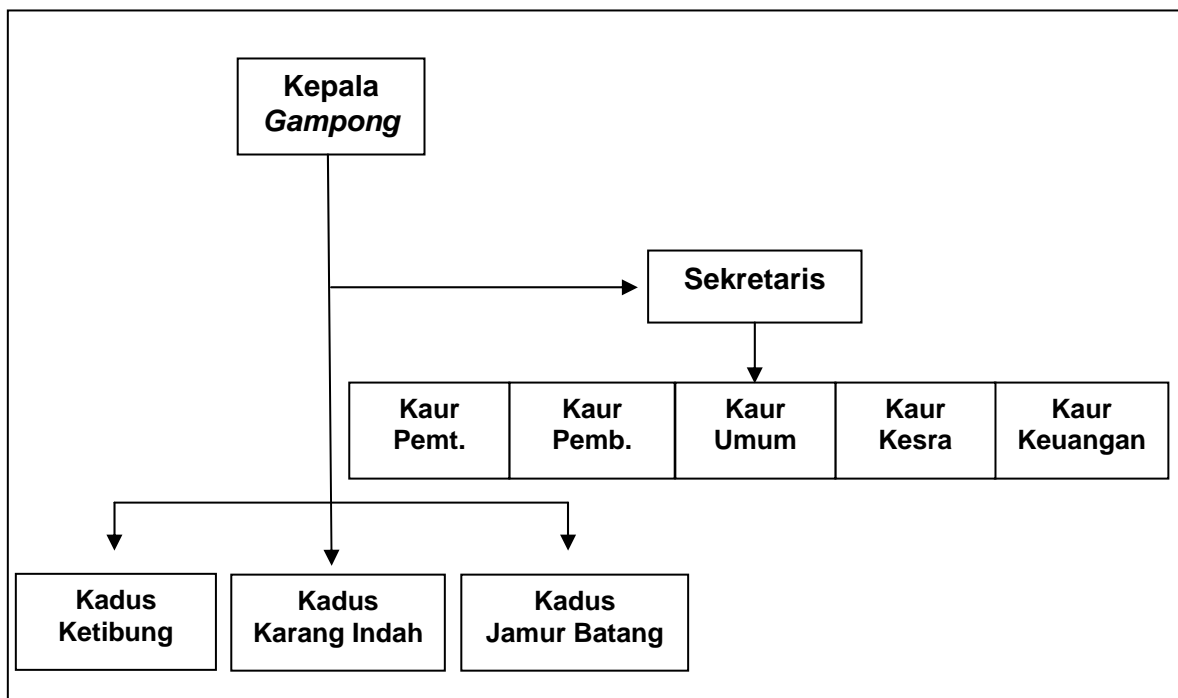
Sekarang *gampong* ini tengah menunggu proses keputusan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menjadi *gampong* definitif. Masyarakat percaya keinginan mereka ini akan segera dikabulkan karena selain sudah memperoleh persetujuan dari Gampong Bunin (*gampong* induknya) dan pihak kecamatan, *gampong* persiapan ini mempunyai wilayah luas dan jumlah penduduk cukup banyak. Sementara itu, penduduknya terus bertambah, baik berasal dari pengungsi yang pulang maupun pendatang dari daerah sekitarnya. Dengan ketersediaan sumber daya seperti itu dan nantinya diperkuat dengan status sebagai *gampong* definitif, masyarakat percaya masa depan mereka akan terus membaik. Kecenderungan ke arah itu bahkan sudah mulai terlihat, 3 tahun terakhir ini kesejahteraan hidup masyarakat Ketibung Musara mulai membaik. Hal ini tidak terlepas dari sikap kemandirian penduduk dalam membangun usaha ekonomi dan berbagai aspek kehidupan sosial mereka. Selain itu, usaha aktif aparat *gampong* (persiapan) dalam merespons program pemerintah dan mencari akses untuk menarik berbagai program pembangunan masuk ke *gampong* ini diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

V. PERAN LEMBAGA DAN KELEMBAGAAN GAMPONG

Berbagai lembaga menampakkan peran pentingnya dalam upaya mengefektifkan peran pemerintahan Gampong Ketibung Musara dan mengoptimalkan capaian pembangunan *gampong* setelah pemisahan dengan *gampong* induknya, Bunin. Namun, karena tingkat kedekatan hubungan sosial di antara warga masyarakat, sebagaimana suasana masyarakat pedesaan pada umumnya, peran setiap lembaga tersebut seringkali kabur atau peran antara lembaga yang satu dengan lainnya saling tumpang-tindih. Beberapa di antara lembaga tersebut adalah pemerintahan *gampong*, lembaga adat, dan organisasi sosial keagamaan yang memberi bingkai bagi berbagai kegiatan masyarakat.

5.1 Lembaga Pemerintahan *Gampong*

Meskipun masih berstatus sebagai *gampong* persiapan, Ketibung Musara sudah memiliki perangkat *gampong* dengan struktur organisasi yang lengkap (Gambar 8). Kepala *gampong* yang juga disebut *Keuchik* didampingi oleh seorang *sekretaris gampong*. Sekretaris membawahi lima kepala urusan (*kaur*), masing-masing *kaur* adalah untuk urusan (i) pemerintahan; (ii) pembangunan; (iii) umum; (iv) kesejahteraan rakyat; dan (v) keuangan. Setiap dusun yang tergabung dalam *gampong* ini dipimpin oleh kepala dusun (*kadus*). Semua unit dalam struktur tersebut secara resmi sudah ada pejabatnya. Seluruh pejabat *gampong* yang berjumlah sepuluh orang tersebut masih tergolong berpendidikan rendah, yaitu tamat SD. Dengan demikian, dapat diduga bahwa masih banyak warga *gampong* ini yang berpendidikan tidak tamat SD atau bahkan tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa gedung SD di Gampong Ketibung Musara baru dibangun pada 2006.



Gambar 8. Struktur organisasi pemerintahan Gampong Ketibung Musara

Sumber: Pemerintah Kecamatan Serbajadi, 2007

Pemerintah Gampong Ketibung Musara sedang mengajukan proposal revitalisasi perkebunan dengan maksud memanfaatkan lahan tidur seluas sekitar 12.000 ha. Program revitalisasi perkebunan tersebut merupakan program pemerintah yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Timur. Rencananya melalui program revitalisasi perkebunan ini, penduduk Ketibung Musara akan menanam kelapa sawit. Di balik rencana ini, masyarakat Gampong Ketibung Musara mulai melihat adanya potensi persoalan sebab semua urusan antara pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Perkebunan, dan masyarakat petani *gampong* ini masih dilakukan melalui pemerintahan Gampong Bunin. Padahal lokasi perkebunan berada di Gampong (persiapan) Ketibung Musara. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah kabupaten mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghindari sengketa antara penduduk Bunin dan Ketibung Musara di kemudian hari (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008).

Keuchik Ketibung Musara kelihatannya mempunyai pengaruh cukup kuat di antara penduduk *gampong*. Dia memiliki kemampuan menjaga dan mengembangkan kegotongroyongan di antara penduduk, termasuk kerja sama dengan tokoh agama dan adat. Sejak awal proses musyawarah dalam usaha untuk membentuk Gampong Ketibung Musara yang terlepas dari Gampong Bunin, keterlibatan *keuchik* terlihat dominan, begitu juga pada kegiatan gotong-royong pembangunan masjid dan upaya menarik Program Revitalisasi Perkebunan ke *gampong* ini.

Keuchik adalah salah seorang di antara sedikit orang yang mampu mengembangkan hubungan baik dengan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, termasuk dengan bupati yang disebutnya sebagai “kawan saya”. Keluasan relasi dan kemampuannya membina hubungan dengan lembaga lain di tingkat *gampong*, kecamatan, dan kabupaten, serta kemampuannya membina semangat kegotongroyongan di antara warga *gampong*, merupakan potensi untuk mampu melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini pula yang menjadi alasan dia dipercaya dan didukung secara luas oleh rakyat untuk menjadi kepala *gampong*.

Partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan tampaknya sudah biasa dilaksanakan dalam masyarakat Ketibung Musara, meskipun secara umum Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) Gampong belum sepenuhnya dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur. Pada saat akan dilakukan pemekaran *gampong*, masyarakat melakukan beberapa kali pertemuan yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat. Salah satu rapat yang dilaksanakan pada 22 Februari 2007, antara lain, dihadiri oleh *Keuchik* Bunin, ketua *tuba pent*¹, 3 kepala dusun, imam masjid, tokoh masyarakat (7 orang), tokoh pemuda (5 orang), tokoh agama (3 orang), guru sekolah (3 orang), dan warga masyarakat (20 orang) (Elite Desa, Gampong Ketibung Musara, NAD, 28 Juli 2008).

Meskipun partisipasi masyarakat telah dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pembangunan, bagaimanapun peran *keuchik* dan kepala dusun (kadus) relatif menonjol. Dalam diskusi dengan anggota masyarakat mengenai kelembagaan dan sumber informasi penting, diperoleh informasi bahwa terdapat tiga lembaga yang oleh masyarakat dinilai paling penting dengan nilai sama, yaitu *tuba pent*, ketua adat, dan *keuchik* (FGD Diagram Venn dan Sumber Informasi, Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 30 Juli 2008). Aparat pemerintah

¹Terjemahan ke Bahasa Indonesia dari *tuba pent* adalah empat *tetua* (*gampong*), tetapi dalam perkembangannya *tuba pent* tidak lagi merujuk ke angka tersebut. *Tuba pent* adalah suatu badan kelengkapan *gampong* yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di *gampong* yang berfungsi memberi nasihat kepada *keuchik* dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat, serta menyelesaikan segala sengketa di *gampong* (Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NAD No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat). Dalam istilah kelembagaan nasional di pedesaan, *tuba pent* serupa dengan LKMD (lembaga ketahanan masyarakat desa).

gampong yang terdiri dari *keuchik*, kadus, dan sekretaris *gampong* mempunyai peran penting sebagai sumber informasi bagi masyarakat, sedangkan sumber informasi lainnya adalah tetangga, imam masjid, dan radio. Informasi yang diperlukan oleh warga *gampong* adalah mengenai raskin, BLT, bantuan PLTS, imunisasi, askeskin, harga bahan bakar minyak (BBM), rapat *gampong*, kegiatan gotong-royong, pengajian umum, wirid Yasin, waktu tanam, dan sebagainya. Berbagai informasi tersebut mencakup, baik berbagai program bantuan/kegiatan yang datang dari luar maupun yang dilakukan oleh institusi lokal/*gampong*.

5.2 Peran Lembaga Adat

Peran lembaga adat dalam kehidupan sehari-hari tidak menonjol. Dalam keseharian lembaga adat disamakan dengan kebiasaan (tradisi), terutama yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian (lihat juga uraian pada bagian sumber daya sosial). Dalam berbagai FGD dan wawancara mendalam tidak didapatkan informasi mengenai peran lembaga adat dalam pembagian warisan, urusan tanah, dan sebagainya. Akan tetapi, masyarakat menyadari keberadaan lembaga adat dan menyatakan bahwa lembaga ini mempunyai peran penting dalam kehidupan mereka.

Peran lembaga adat melalui *tuba pent* menjadi menonjol pada saat urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam proses pengambilan keputusan untuk memisahkan diri dari Gampong Bunin, misalnya, lembaga adat berperan aktif. Kelihatannya terdapat keharusan bahwa dalam proses pembentukan *gampong* dukungan dan persetujuan lembaga adat khususnya *tuba pent* sangat diperlukan. Dalam hal keputusan mendirikan Gampong Ketibung Musara, *tuba pent* mendukungnya dengan cara memberikan pernyataan tertulis yang ditandatangani. Mereka yang duduk di lembaga adat adalah orang-orang tua (berumur 50 tahun ke atas) atau dituakan dan merupakan lapisan elite *gampong*, terutama dari segi keturunan, meskipun pendidikan mereka rendah (semuanya hanya tamat SD).

5.3 Peran Lembaga Sosial dan Keagamaan

Kegiatan kemasyarakatan lain yang menonjol adalah kegotongroyongan warga masyarakat untuk melaksanakan tujuan bersama. Kuatnya kegotongroyongan ini ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain, homogenitas masyarakat baik dari segi suku, agama yang dianut, tingkat kesejahteraan (mayoritas masih miskin), dan kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan seperti mengolah tanah secara berkelompok (kelompok tani yang mengerjakan tanah secara bergiliran), sikap solidaritas tinggi yang ditunjukkan pada tingkat kepedulian terhadap tetangga, seperti saling pinjam-meminjam uang atau bahan makanan pada saat ada warga yang menghadapi situasi darurat (sakit, masa paceklik).

Lembaga keagamaan mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya secara sadar atau tidak dalam membina kerukunan dan keterikatan sosial di antara sesama anggota masyarakat. Di Gampong Ketibung Musara ini, paling tidak seminggu sekali, baik kelompok ibu maupun kelompok bapak, berhimpun melalui wadah (lembaga) wirid Yasin. Kelompok wirid Yasin, khususnya kelompok ibu, bukan hanya untuk forum pendalaman dan pengamalan ajaran agama, tetapi juga untuk mengonsolidasikan kegiatan lain serta merupakan saluran informasi bagi warga. Kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti pengumpulan dana dan kegiatan pembangunan masjid juga dilaksanakan melalui kelompok wirid Yasin.

Selain hal di atas, kegiatan yang sesungguhnya merupakan forum keagamaan tersebut, di lingkungan ibu-ibu dimanfaatkan juga untuk menyelenggarakan arisan. Kelompok wirid Yasin dan sekaligus kelompok arisan ibu-ibu ini, kemudian membentuk kelompok simpan-pinjam sebagai upaya mencari, mengumpulkan, dan memenuhi kebutuhan modal usaha. Kelompok simpan-pinjam tersebut pada mulanya dibentuk dalam rangka merespons kegiatan PNPM Mandiri yang mulai diperkenalkan di *gampong* ini.

VI. PRIORITAS DAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

6.1 Prioritas Masalah

Dalam tiga prioritas masalah yang dikemukakan oleh tiap-tiap kelompok (bapak, ibu, dan remaja) terdapat satu hal yang menjadi isu bersama, yaitu kekurangan modal usaha (FGD Prioritas Masalah dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Ibu, Kelompok Bapak, dan Kelompok Remaja, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008). Masalah bersama ini muncul didasarkan pada kenyataan bahwa usaha perkebunan memerlukan modal besar dibanding dengan usaha pertanian lainnya, seperti tanaman pangan. Untuk mengolah lahan, misalnya, pekebun memerlukan modal sekitar 1 juta rupiah per ha. Ketiadaan modal membuat mereka tidak bisa membeli sarana produksi yang diperlukan bagi sebuah usaha perkebunan, seperti bibit, racun hama, pupuk, alat semprot, dan sebagainya. Mereka yang tergolong miskin nyaris tidak mungkin menyediakan modal sebesar itu. Akibatnya, usaha mereka sebagai pekebun sering gagal, bahkan banyak yang gagal sebelum dimulai. Dari penggabungan masalah utama kemiskinan yang diajukan setiap kelompok, di luar “tidak punya modal” terdapat enam penyebab utama kemiskinan, yaitu kurangnya sarana transportasi (ibu-ibu), luasnya lahan terlantar (bapak-bapak), tidak tersedia fasilitas MCK (ibu-ibu), putus sekolah (remaja), pertanian/perkebunan gagal (bapak-bapak), dan kurangnya perhatian pemerintah (remaja).

Setelah menyusun prioritas masalah, setiap kelompok FGD selanjutnya mendiskusikan garis besar alternatif pemecahannya. Persoalan yang menghambat usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata masih cukup banyak sebagaimana yang dikemukakan oleh setiap kelompok FGD berikut ini.

6.2 Alternatif Pemecahan Masalah

Menurut kelompok bapak (Tabel 9), terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi berupa lahan terlantar, tidak ada modal untuk mengelolanya dan kegagalan usaha tani, terutama akibat ancaman hama binatang. Untuk mengatasinya mereka membutuhkan bantuan dari luar. Bantuan yang mereka perlukan berupa bibit unggul dan sarana serta peralatan pertanian lainnya, penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan bertani, penanggulangan hama binatang, dan pembentukan koperasi atau lembaga keuangan. Berbagai hal yang diperlukan untuk keluar dari persoalan yang mereka hadapi, terutama oleh kelompok miskin, memang hampir tidak mungkin mereka upayakan dengan kekuatan/kemampuan sendiri. Untuk membuka lahan dalam jumlah luas dan cepat dan pembuatan jalan menuju areal perkebunan, petani memerlukan alat berat, seperti traktor.

Beberapa hal sederhana yang dapat dikerjakan penduduk adalah setahap demi setahap membuka dan membersihkan lahan secara swadaya (perorangan, gotong-royong). Sementara itu, untuk biaya hidup selama mengerjakan semua itu mereka melakukan kerja *ongkosan*. Dalam hal menghadapi ancaman hama binatang, terutama gangguan gajah, kadang-kadang penduduk dapat mengusirnya, tetapi dalam banyak kejadian mereka pasrah, gajah biasanya tinggal di sekitar *gampong* ini antara beberapa hari sampai beberapa minggu tergantung ketersediaan makanannya. Memagar tanaman dapat mereka lakukan terhadap tanaman pangan yang tidak terlalu luas, itu pun hanya mampu menghambat hama babi, tidak hama gajah dan monyet.

Tabel 10. Pokok dan Alternatif Pemecahan Masalah menurut Kelompok Bapak

Pokok Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Bentuk Pemecahan Masalah		
		Bisa Dilakukan Masyarakat Sendiri	Perlu Dukungan/ Bantuan dari Luar	Sepenuhnya Memerlukan Bantuan Pihak Luar
1. Lahan terlantar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggarap lahan terlantar ▪ Mengajukan proposal ke pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ngimas</i> (membersihkan lahan) secara swadaya (gotong- royong) ▪ Kerja <i>ongkosan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bibit unggul, racun hama, alat semprot ▪ Penyuluhan ▪ Peralatan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan jalan ke lokasi perkebunan ▪ Alat berat seperti traktor
2. Tidak ada modal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendatangkan modal 	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk lembaga semacam koperasi ▪ Membentuk usaha kecil menengah (UKM) 	-
3. Pertanian/perkebunan gagal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggulangan hama (gajah, babi, dsb.) ▪ Membuat proposal ke pemda dan WWF (World Wildlife Fund) dalam menanggulangi gajah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengusir gajah dan meracun babi hutan ▪ Memagar tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja sama dengan badan-badan nasional dan internasional dalam menanggulangi gajah ▪ Penyuluhan pertanian/perkebunan 	-

Sumber: FGD Prioritas Masalah dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Bapak, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008.

Kelompok ibu melihat bahwa persoalan utama mereka adalah kurangnya sarana transportasi, kurangnya modal, dan tidak adanya sarana MCK (Tabel 10). Mereka mengharapkan adanya bantuan dari luar untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Mereka mengharapkan pemerintah memfasilitasi perusahaan swasta untuk menjalankan usaha transportasi yang melintas di *gampong* mereka secara reguler. Dengan demikian, penduduk akan lebih mudah bepergian ke pasar, sekolah, puskesmas, dan lain-lain.

Dalam kaitan dengan modal usaha, kelompok ibu mengharapkan adanya sumber pinjaman dari luar, termasuk perlu adanya pengusaha/pedagang pengumpul yang selain membeli hasil pertanian mereka, sekaligus juga sebagai sumber pinjaman modal. Untuk mendukung usaha ini kelompok ibu telah siap membentuk organisasi usaha simpan-pinjam. Menyadari bahwa penduduk tidak mungkin mampu menyediakan modal bagi usaha perkebunan, mereka mengharapkan agar pemerintah menjadikan wilayah *gampongnya* sebagai lokasi Program Pemanfaatan Lahan untuk Perkebunan Sawit. Biaya hidup selama kebun mereka belum berproduksi, dapat mereka penuhi dengan menangkap ikan dan mencari hasil hutan.

Hanya kelompok ibu yang memikirkan ketiadaan MCK sebagai persoalan utama dalam kehidupan *gampong*. Urusan kebersihan dalam rumah tangga pada banyak komunitas di Indonesia memang biasanya menjadi tanggung jawab ibu-ibu. Untuk memenuhi kebutuhan akan kebersihan tersebut, mereka mengharapkan dapat membangun MCK dan sumur dangkal sebagai sumber air bersih. Penduduk *gampong* hanya memiliki tenaga, sementara teknologi untuk membangun semua itu diharapkan datang dari luar, terutama pemerintah.

Tabel 11. Pokok dan Alternatif Pemecahan Masalah menurut Kelompok Ibu

Pokok Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Bentuk Pemecahan Masalah		
		Bisa Dilakukan Masyarakat Sendiri	Perlu Dukungan/ Bantuan dari Luar	Sepenuhnya Memerlukan Bantuan Pihak Luar
1. Kurangnya transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan sarana transportasi (<i>gampung</i>) 	-	<ul style="list-style-type: none"> Kerja sama dengan pengusaha sarana angkutan untuk membuka dan memperbanyak transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan sarana transportasi yang melintasi <i>gampung</i> (setiap hari, reguler)
2. Tidak punya modal	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok wirid Yasin ibu-ibu membuat kelompok simpan pinjam Usaha sampingan cari ikan, damar, dan hasil hutan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk kelompok simpan-pinjam 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pinjaman untuk kelompok ibu 	<ul style="list-style-type: none"> Mendatangkan <i>toke</i> pembeli hasil kebun Program pemanfaatan lahan masyarakat menjadi kebun sawit
3. Tidak ada fasilitas MCK	<ul style="list-style-type: none"> Membuat MCK dan sumur dangkal 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari pemerintah untuk program air bersih Dukungan dari LSM dan swasta 	-

Sumber: FGD Prioritas Masalah dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Ibu, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008.

Tabel 11 memperlihatkan hasil FGD kelompok remaja. Masalah utama bagi kelompok ini adalah putus sekolah, kurangnya perhatian pemerintah pada kegiatan penyuluhan dan program-program pembangunan, dan kurangnya lapangan kerja. Akibat mengungsi selama memanasnya konflik GAM dan TNI/POLRI banyak anak yang putus sekolah. Gedung SD di *gampung* ini baru dibangun pada 2006, itu pun hanya tiga lokal, belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak usia SD secara memadai. Untuk itu, diperlukan bantuan tambahan pembangunan gedung SD. Selain itu, tentu saja gurunya pun perlu diperbanyak. Seiring dengan itu, dalam upaya mengejar ketertinggalan mereka yang putus sekolah, kelompok remaja mengharapkan Dinas Pendidikan Nasional dapat menyelenggarakan program belajar paket A, B, dan C.

Kelompok remaja menilai *gampung* mereka kurang mendapat perhatian pemerintah. Untuk itu, kelompok remaja menyadari bahwa masyarakat perlu aktif mencari peluang yang disediakan oleh pemerintah, sebaliknya masyarakat juga harus bersedia melaksanakan berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Kepada pemerintah, kelompok remaja mengharapkan agar pemerintah memenuhi permintaan rakyat. Untuk kasus Gampong Ketibung Musara, mereka mengharapkan ada program tambahan bantuan PLTS² dan diwujudkannya Program Revitalisasi Perkebunan di *gampung* mereka.

²Pada akhir 2008 pemerintah melalui BRR memberikan bantuan PLTS baru untuk sebanyak 100 rumah penduduk di Gampong Ketibung Musara.

Tabel 12. Pokok dan Alternatif Pemecahan Masalah Menurut Kelompok Remaja

Pokok Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Bentuk Pemecahan Masalah		
		Bisa Dilakukan Masyarakat Sendiri	Perlu Dukungan/ Bantuan dari Luar	Sepenuhnya Memerlukan Bantuan Pihak Luar
1. Putus Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan paket A, B, dan C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendirikan balai pendidikan paket A, B, C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan lokal (kelas), guru, dan rumah guru
2. Kurang perhatian pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktif merespons peluang-peluang yang diberikan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjalankan peraturan yang di instruksikan/ dibuat pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merealisasikan usulan/ program yang diajukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasikan tambahan PLTS ▪ Wujudkan program revitalisasi perkebunan
3. Pengangguran karena kurang modal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengajukan proposal revitalisasi perkebunan (sudah diajukan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengerjakan kebun sendiri ▪ <i>Ongkosan</i> dan ▪ <i>Mocok-mocok</i> (kerja serabutan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga kerja dan lahan untuk perusahaan yang melaksanakan revitalisasi perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengundang investor untuk membuka lapangan kerja

Sumber: FGD Prioritas Masalah dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Remaja, Gampong Ketibung Musara, NAD, 31 Juli 2008.

Pengangguran adalah persoalan utama kemiskinan lainnya yang dilihat oleh kelompok remaja. Persoalan ini tentunya muncul karena pengalaman mereka yang mengalami betapa sulitnya mencari pekerjaan. Kerja upahan yang tersedia bagi mereka dan penduduk pada umumnya terbatas. Dalam kaitan itu, mereka melihat jalan keluar yang tepat untuk masyarakat *gampong* adalah melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan mengundang investor untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di sekitarnya.

VII. CATATAN PENUTUP

Pada akhir 2007 Gampong Ketibung Musara memasuki proses pemisahan diri dari *gampong* induknya, yaitu Gampong Bunin. Jaraknya dari *gampong* induk sejauh 20 km menjadi penyebab dusun ini kurang mendapat perhatian. Keinginan memisahkan diri makin kuat ketika pada pemilihan *keuchik* pada 2007, tokoh masyarakat dari dusun Ketibung ditolak oleh penduduk dusun induk untuk ikut mencalonkan diri. Oleh karena itu, para tokoh adat dan perangkat dusun pun bersatu-padu mengorganisasi upaya bagi berdirinya *gampong* baru yang terpisah dari Gampong Bunin.

Karena konflik antara GAM dan TNI/POLRI makin memanas pada 2000, semua penduduk mengungsi dan sampai saat ini masih banyak warga yang belum kembali. Selama mengungsi, usaha ekonomi penduduk dan pendidikan anak-anak terbengkalai. Lahan yang ditelantarkan tersebut berubah menjadi semak belukar, dan menjadi habitat berbagai jenis binatang. Penduduk yang pulang dari mengungsi menggantungkan pencahariannya pada usaha bertani di lahan kering (padi ladang), mengambil hasil hutan, dan menangkap ikan di sungai, sambil mulai membangun perkebunan yang diharapkan menjadi gantungan hidup bagi masa depan mereka. Namun, usaha mengelola perkebunan dan ladang sering diganggu oleh hama binatang. Selain itu, sebagai pekerjaan tambahan, mereka menanam sayur, memelihara ternak, menganyam tikar dan menjadi buruh serabutan. Sejauh ini, berbagai kegiatan tersebut masih merupakan usaha subsisten, sekadar untuk mempertahankan hidup sehari-hari. Meskipun begitu, masyarakat menilai bahwa kondisi kesejahteraan mereka 2–3 tahun terakhir ini mulai membaik.

Di Ketibung Musara sebagai *gampong* persiapan terdapat beberapa kelompok sosial/keagamaan yang menjadi media tempat masyarakat bersosialisasi sehingga kohesivitas sosial bisa terjaga. Kohesivitas ini didukung juga oleh homogenitas komunitas yang umumnya beretnis Gayo, beragama Islam, dan mayoritas miskin. Keharmonisan hubungan sosial dan kegiatan gotong-royong terlihat meningkat setelah pemisahan *gampong*. Misalnya, dengan berswadaya dan bergotong-royong, penduduk mampu membangun sebuah masjid. Semua ini merupakan modal penting bagi upaya membangun penghidupan mereka.

Sumber daya alam di daerah yang luasnya 15 km² ini cukup beragam, antara lain, lahan pertanian, hutan dengan berbagai hasil dan keragaman flora/faunanya, bahan galian tambang, serta sungai dan air terjun. Namun, karena keterbatasan modal dan penguasaan teknologi, penduduk belum dapat memanfaatkan semua sumber tersebut. Masyarakat menyadari bahwa semua sumber daya alam itu merupakan aset yang di masa depan dapat menjadi sumber bagi perbaikan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan yang disepakati masyarakat dan sudah diusulkan pemerintah *gampong* ke Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah revitalisasi perkebunan. Revitalisasi perkebunan dipilih sebagai alternatif utama penanggulangan kemiskinan sebab di sini terdapat lahan yang belum dimanfaatkan seluas lebih dari 12.000 ha.

Namun, untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah komunitas ini masih memerlukan bantuan dari berbagai pihak luar, khususnya pemerintah. Pada 2006 *gampong* ini menerima bantuan berupa tiga ruang gedung SD. Gedung ini merupakan gedung SD pertama di Gampong Ketibung Musara. Mereka masih memerlukan ruang dan tenaga kependidikan tambahan karena murid yang belajar sudah terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk mendorong dan membantu agar anak-anak dapat bersekolah di tingkat SMP yang terletak 10 km dari permukiman mereka diperlukan penyediaan sarana transportasi yang reguler. Selain itu, untuk mengejar ketertinggalan pendidikan generasi muda yang putus sekolah, mereka mengharapkan adanya penyelenggaraan program belajar paket A, B, dan C.

Persoalan sosial lainnya adalah di bidang pelayanan kesehatan. Penduduk Ketibung Musara umumnya hanya berobat pada dukun. Sarana dan tenaga kesehatan tidak tersedia di *gampong* ini. Puskesmas dan pustu terdekat berada di Gampong Peunaron yang berjarak 10 km. Oleh karena itu, kartu askeskin yang diberikan jarang digunakan karena biaya transportasi ke puskesmas cukup mahal. Dalam bidang kesehatan ini masyarakat masih sangat memerlukan penyuluhan agar wabah diare yang muncul di setiap musim kemarau, misalnya, dapat dicegah. Di *gampong* ini tidak ada satu pun rumah yang mempunyai jamban. Masyarakat biasa buang air besar di kebun atau di sungai. Sungai tersebut juga menjadi tempat mandi, cuci, dan merupakan sumber air minum.

DAFTAR ACUAN

BPS Kabupaten Aceh Timur dan Bappeda Kabupaten Aceh Timur (2007) *Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2006*. Kabupaten Aceh Timur: BPS Kabupaten Aceh Timur dan Bappeda Kabupaten Aceh Timur.

Department for International Development (DFID) (1999) 'Sustainable Livelihoods Guidance Sheet.' London: DFID.

Pemerintah Desa Gampong Ketibung Musara (2008) *Data Isian (Potensi) Gampong Ketibung Musara*: Pemerintah Desa Gampong Ketibung Musara.

Pemerintah Kecamatan Serbajadi (2007) 'Proposal Permohonan Pembentukan Gampong Persiapan Ketibung Musara.' Kecamatan Serbajadi: Pemerintah Kecamatan Serbajadi.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

LAMPIRAN

Metodologi Penelitian

Dalam upaya untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat di Gampong Ketibung Musara, Lembaga Penelitian SMERU bersama Tim AKP Kabupaten Aceh Timur dan dengan dukungan OXFAM GB Banda Aceh melakukan kegiatan analisis kemiskinan partisipatoris (AKP). Kegiatan AKP di tingkat *gampong* ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui AKP di Kabupaten Aceh Timur.”

Secara umum, rangkaian kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah (pemda) kabupaten dalam melakukan analisis kemiskinan secara partisipatoris, sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan daerah.³ Kegiatan AKP di Gampong Ketibung Musara ini dilakukan pada akhir Juli–Agustus 2008, setelah melakukan diskusi di tingkat kabupaten dan pelatihan teknis pelaksanaan AKP yang dilaksanakan pada Juni 2008. Secara spesifik, kegiatan AKP di *gampong* ini dimaksudkan untuk:

1. memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat *gampong* serta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya; dan
2. membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi serta permasalahan kesejahteraan yang mereka hadapi serta potensi yang mereka miliki untuk memecahkan permasalahan tersebut.

AKP Gampong ini dilakukan di tiga *gampong* yang mewakili tipologi penghidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, yaitu Gampong Kabu, Kecamatan Peurelak Barat (tipologi persawahan), Gampong Ketibung Musara, Kecamatan Serbajadi (tipologi perkebunan) dan Gampong Kuala Geulumpang, Kecamatan Julok (tipologi perikanan-nelayan). Pemilihan ketiga *gampong* ini tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan atau mewakili permasalahan yang dihadapi oleh ratusan *gampong* lainnya di Kabupaten Aceh Timur. Namun, diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dihadapi oleh tipologi penghidupan utama masyarakat.

Hasil AKP tingkat *gampong* ini digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan strategi, kebijakan, dan program pembangunan, khususnya dalam upaya menanggulangi kemiskinan, baik yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga nonpemerintah di Kabupaten Aceh Timur. Masukan tersebut disampaikan melalui serangkaian diskusi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pengumpulan data dan informasi di Gampong Ketibung Musara dilakukan secara partisipatoris melalui sejumlah FGD, wawancara mendalam dengan aparat pemerintahan *gampong*, tokoh masyarakat, dan beberapa penduduk *gampong*, serta pengamatan kondisi *gampong* secara langsung (lihat Tabel A1). Untuk melakukan kegiatan tersebut, empat anggota Tim AKP Kabupaten Aceh Timur dan dua peneliti SMERU tinggal di Gampong Ketibung Musara selama 6 hari, yaitu dari 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2008.

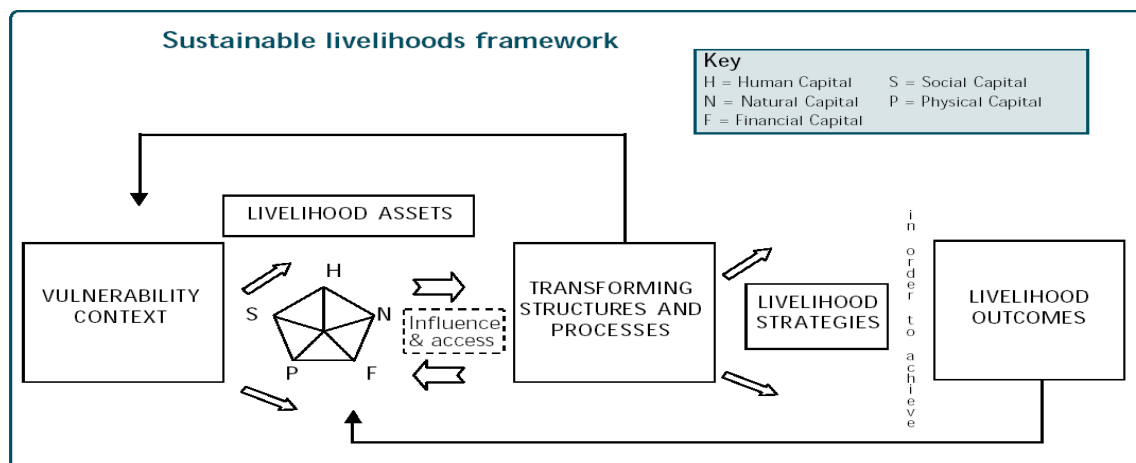
³Hasil kegiatan di Kabupaten Aceh Timur dipaparkan dalam Laporan “Penghidupan Masyarakat dan Kapasitas Daerah dalam Mengatasi Kemiskinan: Hasil AKP di Kabupaten Aceh Timur”.

Tabel A1. Rangkaian Diskusi dan Wawancara di Gampong Ketibung Musara

Waktu	Jenis Kegiatan	Keterangan	
Hari ke-1	Klasifikasi kesejahteraan	▪ Peserta kelompok campuran (laki-laki-perempuan, kaya-miskin, tua dan muda): sebanyak 50 orang.	
	Analisis kecenderungan	▪ Analisis kecenderungan dilakukan dengan kelompok laki-laki 25 orang dan kelompok perempuan 25 orang secara terpisah.	
	Pemetaan sosial dan sumber daya	▪ Pemetaan dilakukan oleh orang yang benar-benar paham mengenai wilayah <i>gampong</i> . Peserta 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.	
Hari ke-2	Kalender musiman	▪ FGD dilakukan empat kali dengan peserta kelompok laki-laki miskin 17 orang dan kelompok perempuan miskin 15 orang, masing-masing kelompok mendiskusikan kalender musiman dan kalender harian.	
	Kalender harian		
	Analisis gender	▪ Dilakukan dua kali FGD, masing-masing dengan kelompok laki-laki miskin sebanyak 17 orang dan kelompok perempuan miskin sebanyak 15 orang.	
	Wawancara sejarah Perkembangan <i>gampong</i>	▪ Dilakukan dengan kepala <i>gampong</i> , tokoh adat, dan tokoh masyarakat.	
	Wawancara isian data <i>gampong</i>	▪ Dilakukan dengan kepala <i>gampong</i> dan sekretaris <i>gampong</i> .	
Hari ke-3	Diagram venn dan sumber informasi	▪ Dua kali FGD masing-masing dengan peserta kelompok laki-laki miskin 10 orang dan kelompok perempuan miskin 7 orang.	
	Evaluasi program bantuan	▪ Diskusi dilakukan dua kali masing-masing dengan kelompok laki laki miskin 13 orang dan kelompok perempuan miskin 7 orang.	
	Wawancara sejarah Perkembangan <i>gampong</i> (lanjutan)	▪ Dilakukan beberapa kali dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kepala <i>gampong</i> yang paham mengenai sejarah perkembangan <i>gampong</i> .	
	Wawancara isian data <i>gampong</i> (lanjutan)	▪ Dilakukan dengan kepala <i>gampong</i> dan sekretaris <i>gampong</i> .	
Hari ke-4	Analisis sumber mata pencaharian	▪ Dilakukan dua kali FGD masing-masing dengan kelompok miskin gabungan, laki-laki 11 orang serta perempuan 9 orang; dan kelompok kaya gabungan, laki-laki 8 orang serta perempuan 7 orang.	
	Analisis keuangan rumah tangga	▪ Empat kali FGD masing-masing dengan kelompok laki-laki miskin 9 orang serta perempuan miskin 9 orang dan kelompok laki-laki kaya 7 orang serta perempuan kaya 9 orang.	
	Analisis gender	▪ Dilakukan dua kali FGD masing-masing dengan kelompok laki-laki miskin 17 orang dan kelompok perempuan miskin 15 orang.	
	<i>Transect walk</i>	▪ Dilakukan beberapa kali untuk memverifikasi informasi dan melakukan observasi wilayah dan permukiman serta wawancara dengan penduduk.	
Hari ke-5	Diagram sebab-akibat kemiskinan	▪ FGD dilakukan tiga kali yaitu dengan kelompok laki-laki miskin 17 orang, perempuan miskin 15 orang, dan muda-mudi miskin 18 orang, masing-masing pemuda 9 orang dan pemudi 9 orang.	
	Prioritas masalah dan alternatif pemecahan Masalah		
	<i>Transect walk</i>	▪ Dilakukan beberapa kali untuk memverifikasi informasi dan melakukan observasi wilayah dan permukiman serta wawancara dengan penduduk.	
	Wawancara kisah hidup individu	1 perempuan (miskin→miskin): tetap miskin	
		1 laki-laki (miskin→miskin): tetap miskin	
1 perempuan (miskin→kaya): berubah dari miskin menjadi kaya			
	1 laki-laki (miskin→kaya); berubah dari miskin menjadi kaya		
	1 perempuan (kaya→miskin) berubah dari kaya menjadi miskin		
	1 laki-laki (kaya→miskin) berubah dari kaya menjadi miskin		
Hari ke-6	Diskusi pleno	▪ Diikuti oleh semua komponen masyarakat, untuk mendiskusikan seluruh hasil FGD dan memverifikasi informasi yang didapatkan selama melakukan AKP; peserta lebih dari 70 orang.	

Hasil diskusi, wawancara dan pengamatan langsung dicatat apa adanya dan dikumpulkan dalam “Laporan Hasil Diskusi dengan Masyarakat”⁴. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan cara menggabungkan dan membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin dan konsisten, atau lebih dikenal sebagai proses triangulasi.

Selain interpretasi langsung terhadap informasi yang dikemukakan masyarakat, juga dilakukan analisis dengan mengadopsi kerangka penghidupan berkelanjutan (*Sustainable Livelihoods Framework-SLh*) yang diperkenalkan oleh DFID.⁵ Dalam kerangka analisis tersebut, diidentifikasi lima jenis aset yang dimiliki masyarakat *gampong* secara umum dan khususnya kelompok miskin–perempuan dan laki-laki–yang merefleksikan kesejahteraan masyarakat secara multidimensional. Kelima jenis aset tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi/keuangan, serta infrastruktur fisik dan modal sosial. Di samping itu, juga diidentifikasi faktor-faktor kerentanan (guncangan, kecenderungan, dan musiman) serta berbagai lembaga (pemerintah, nonpemerintah, dan swasta) dan proses (peraturan, program, dan budaya) yang memengaruhi dinamika penghidupan masyarakat *gampong*. Pemanfaatan kerangka SLh tersebut dimaksudkan untuk membantu memahami keterkaitan antara berbagai faktor dan secara sistematis mengidentifikasi permasalahan kemiskinan yang membelit masyarakat *gampong*.



Gambar A1. Kerangka penghidupan berkelanjutan

Sumber: DFID, 1999.

Pelaksanaan FGD dilakukan dengan hampir semua keluarga di Gampong Ketibung Musara yang terdiri dari tiga dusun. Diskusi dilaksanakan dengan cara berpindah-pindah tempat di ketiga dusun. Untuk melaksanakan diskusi termasuk mengundang peserta, dikoordinasikan oleh Ketua Tim AKP dengan *Genchiek* (Kepala Gampong) Ketibung Musara, selanjutnya *genchiek* mengkoordinasikannya dengan setiap kepala dusun (kadus). Kadus, kemudian, mengundang dan mengatur warga untuk hadir dalam FGD yang telah ditentukan. Secara keseluruhan diskusi kelompok dilakukan sebanyak 29 kali, ditambah dengan wawancara mendalam sebanyak 6 kali, tidak kurang dari 450 peserta aktif berpartisipasi memberikan berbagai jenis informasi yang diperlukan.

⁴Laporan diskusi ini tidak dipublikasikan, tetapi bila diperlukan dapat diperoleh di Lembaga Penelitian SMERU.

⁵Kerangka SLh mengikuti Sustainable Livelihoods Framework (DFID, 1999).